**PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK**

**SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN**

**WAJIB PAJAK**

**T e s i s**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Universitas Dharmawangsa**

**Oleh:**

**HERRY JHON BAHRI PILIANG**

**NPM: 21911014**

****

**SEKOLAH PASCA SARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Judul :

Nama : Herry Jhon Bahri Piliang

NPM : 21911014

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyetujui

Komisi Pembimbing

 Pembimbing I Pembimbing II

****

****

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

NIDN : 0029125702 NIDN : 0113028704



Mengetahui

Ketua Program Studi

Magister Hukum

**Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

**NIDN : 0113028704**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Judul :

Nama : Herry Jhon Bahri Piliang

NPM : 21911014

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan dan Disahkan di Sidang Penguji

Pada Tanggal 23 April 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**K e t u a**



**Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

**NIDN : 0113028704**

**** Penguji I Penguji II

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

NIDN : 0029125702 NIDN : 0113028704



 Penguji III

 Mengetahui,

**Dr. Melki Suhery Simamora, SH, M.Kn Direktur Sekolah Pascasarjana**

****NIDN : 0129058206

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

NIDN : 0029125702

Telah diuji pada :

Tanggal : 23 April 2023

**TIM PENGUJI TESIS**

Ketua : Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

Anggota : 1. Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum

2. Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

3. Dr. Melki Suhery Simamora, SH, M.Kn

**PERNYATAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herry Jhon Bahri Piliang

NPM : 21911014

Tempat/Tgl Lahir : Kabanjahe, 27 Mei 1974

Pekerjaan : PNS KPP Pratama Medan Barat

Agama : Islam

Alamat : Jln. Pertambangan Komplek Maysa Tamansari Blok A No. 8

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul***”****Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”*adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 23 April 2023

Yang membuat pernyataan,

**Materai**

Herry Jhon Bahri Piliang

**21911014**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herry Jhon Bahri Piliang

NPM : 21911014

Tempat/Tgl Lahir : Kabanjahe, 27 Mei 1974

Pekerjaan : PNS KPP Pratama Medan Barat

Agama : Islam

Alamat : Jln. Pertambangan Komplek Maysa Tamansari Blok A No. 8

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada Universitas Dharmawangsa Hak Bebas Royalty Non Eksklusive (Non Exclusive, Royalty Free Right) Untuk Mempublikasikan tesis saya yang berjudul

***”****Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”*

Dengan Hak Bebas Royalti Non Esksludif ini Universitas Dharmawangsa berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 23 April 2023

Yang membuat pernyataan,

Herry Jhon Bahri Piliang

**21911014**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Data Pribadi** / *Personal Details*

Nama / *Name* : Herry Jhon Bahri Piliang

Alamat / *Address* : Jln. Pertambangan Komplek Maysa

 Tamansari Blok A No. 8

Kode Post / *Postal Code* :

Nomor Telepon / *Phone* : 081375969000

Email :

Jenis Kelamin / *Gender*  : Laki-Laki

Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : 27 Mei 1974

Status Marital / *Marital Status* : Kawin

Warga Negara / *Nationality* : Indonesia

Agama / *Religion* : Islam

**Riwayat Pendidikan dan Pelatihan**

*Educational and Professional Qualification*

Jenjang Pendidikan

1. -

2.

3. SMU Negeri Kabanjahe tamat tahun 1993

4. Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Tahun 2023

Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

1.

2.

**Riwayat Pengalaman Kerja**

*Summary of Working Experience*

1. Karyawan Swasta

2.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 23 April 2023

Yang membuat pernyataan,

Herry Jhon Bahri Piliang

**21911014**

ABSTRAK

Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Paja

Herry Jhon Bahri Piliang

Prof. Dr. Kusbianto, SH., M.Hum.,

Dr. Ariman Sitompul, SH., MH.,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwasanya penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat ditindak secara hukum melalui proses peradilan pidana. KUP menegaskan bahwa tindak pidana penggelapan pajak merupakan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda dan/atau hukuman penjara. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk mengusut dan menindak tegas pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Jika terjadi pelanggaran, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Oleh karena itu, tindakan hukum yang tegas dan adil harus dilakukan untuk menindak para pelaku tindak pidana penggelapan pajak, sehingga dapat memberikan efek jera kepada masyarakat dan menegakkan keadilan dalam dunia perpajakan.

Tindakan pencegahan dan penyanderaan merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menjaga kepatuhan para wajib pajak. Dalam hukum pajak, pencegahan dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak, termasuk dengan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan informasi potensi pelanggaran pajak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan penggelapan pajak oleh para wajib pajak. Selain pencegahan, penyanderaan juga dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap para wajib pajak yang dianggap melakukan pelanggaran pajak yang serius dan menimbulkan kerugian besar bagi negara. Penyanderaan dapat dilakukan dengan cara membekukan rekening bank atau aset-aset lain yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Tindakan penyanderaan bertujuan untuk memaksa para wajib pajak untuk membayar pajak yang seharusnya dibayarkan dan menegakkan keadilan dalam dunia perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak di Indonesia. Dalam upaya penegakan hukum ini, Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai tindakan seperti pengumpulan data dan informasi, penyelidikan, pengambilan tindakan administrasi, serta penindakan melalui jalur hukum. Melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, Direktorat Jenderal Pajak mampu memperkuat upaya penindakan terhadap pelaku penggelapan pajak. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat dihukum secara tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak sangatlah penting dalam menjaga kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

i

**ABSTRACK**

Herry Jhon Bahri Piliang, Npm: 21911014, Title: "Law Enforcement By The Directorate General Of Taxation Against Persons Of Criminal Actions Of Tax Evavailation As An Effort To Increase Taxpayer Compliance", Supervised by Prof. Dr. Kusbianto, SH., M.Hum., as Chair of the Advisory Commission, Dr. Ariman Sitompul, SH., MH., as Member of the Advisory Commission, Thesis, 2023

 This research aims to find out that law enforcement by the Directorate General of Taxes against perpetrators of criminal acts of tax evasion is an effort to increase taxpayer compliance. According to the Law on General Provisions and Tax Procedures (KUP), perpetrators of criminal acts of tax evasion can be prosecuted legally through the criminal justice process. The KUP emphasizes that the crime of tax evasion is a crime that can be subject to criminal sanctions in the form of fines and/or prison sentences. The government, through the Directorate General of Taxes, has the authority to investigate and take firm action against perpetrators of criminal acts of tax evasion. If a violation occurs, the party who feels aggrieved can report the incident to the authorities for further action. The court has the authority to examine, try and impose sanctions on perpetrators of criminal acts of tax evasion. Therefore, firm and fair legal action must be taken to take action against perpetrators of criminal acts of tax evasion, so that it can have a deterrent effect on society and uphold justice in the world of taxation.

 Preventive measures and taking hostages are efforts that can be taken by the Directorate General of Taxes to maintain taxpayer compliance. In tax law, prevention is carried out by tightening supervision over the implementation of tax payments, including by conducting inspections and collecting information on potential tax violations. This aims to prevent tax evasion by taxpayers. Apart from prevention, hostage-taking can also be carried out by the Directorate General of Taxes against taxpayers who are deemed to have committed serious tax violations and caused large losses to the state. Taking hostages can be done by freezing bank accounts or other assets owned by the taxpayer. The action of taking hostages aims to force taxpayers to pay the taxes they should pay and uphold justice in the world of taxation.

 The Directorate General of Taxes has an important role in enforcing the law against perpetrators of criminal acts of tax evasion in Indonesia. In this law enforcement effort, the Directorate General of Taxes carries out various actions such as collecting data and information, investigating, taking administrative action, and taking action through legal channels. Through collaboration with other law enforcement officials, the Directorate General of Taxes is able to strengthen enforcement efforts against perpetrators of tax evasion. With effective law enforcement, perpetrators of criminal acts of tax evasion can be punished firmly and provide a deterrent effect for other perpetrators. Thus, law enforcement against perpetrators of criminal acts of tax evasion by the Directorate General of Taxes is very important in maintaining taxpayer compliance and increasing state revenues from the taxation sector.

**KATA PENGANTAR**

Segala puji atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sang maha pencipta, dengan izin-Nya Tesis penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”**, dapat selesai dengan baik.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis. Namun sebagai manusia biasa, penulis tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi teknik penulisan maupun tata bahasa. Tetapi walaupun demikian penulis berusaha sebisa mungkin menyelesaikan Tesis ini meskipun tersusun sangat sederhana. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan motivasi.

Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada isteri tercinta saya, Zakkiah br Ginting Munthe , yang telah memberikan dukungan, cinta, dan pengertian dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih kepada anak-anak tersayang, Alya, Adinda, Syakira, Muhammad Gilang, dan Muhammad Fachri, yang selalu menjadi sumber semangat hidup saya.

Selanjutnya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Prof. Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Dharmawangsa Medan sekaligus pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang luar biasa selama penelitian ini berlangsung. Ilmu dan wawasan yang telah Bapak berikan menjadi pondasi yang kuat bagi penelitian ini.

ii

Selanjutnya, ucapan terima kasih saya disampaikan kepada Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Dharmawangsa Medan sekaligus pembimbing II. Terima kasih atas pengawasan dan masukan yang berharga dalam menyempurnakan penelitian ini. Saya sangat berterima kasih atas dedikasi Bapak dalam membimbing saya selama proses ini.

Tak lupa, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada dosen penguji atas bimbingan dan saran yang berharga dalam melaksanakan penelitian ini. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mendukung penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen dan staf administrasi Sekolah Pascasarjana Universitas Dharmawangsa, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan fasilitas yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi kalian dalam menciptakan lingkungan akademik yang inspiratif dan mendukung.

Terakhir, namun tidak kalah penting, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, baik di dalam maupun di luar lingkungan akademik. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan persahabatan yang telah terjalin selama perjalanan ini. Kalian telah menjadi pilar yang kuat dalam mengatasi tantangan dan melewati masa-masa sulit dalam menyelesaikan penelitian ini.

Sebagai penutup, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperluas pemahaman tentang Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Saya berharap bahwa temuan dan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan hukum dan penegakan hukum di masa depan.

Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam kesuksesan penelitian ini. Semoga segala upaya kita selama ini mendapatkan apresiasi dan manfaat yang luas. Terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya.

**Medan, 23 April 2023**

**Penulis**

**Herry Jhon Bahri Piliang**

**DAFTAR ISI**

LEMBAR JUDUL ...................................................................................................

LEMBAR PERSETUJUAN ..................................................................................

LEMBAR PENGESAHAN .....................................................................................

LEMBAR TANGGAL PENGUJI ...........................................................................

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ........................................................

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ..............................................................

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................................

ABSTRAK ............................................................................................................... i

ABSTRACK ............................................................................................................ i

KATA PENGANTAR ............................................................................................. ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii

**BAB I PENDAHULUAN 1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

1. Tujuan Penelitian 12
2. Manfaat Penelitian 13
3. Keaslian Penelitian 14
4. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 14
5. Metode Penelitian 20
6. Sistematika Penulisan 22

BAB II TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG KETENTUAN- UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP) BESERTA KEWENANGAN PENGADILANNYA 24

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Pajak Menurut Undang-Undang

KUP 24

1. Tindakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

Pajak 27

1. Kewenangan Pengadilan dalam Menangani Kasus Tindak Pidana

Penggelapan Pajak 31

iii

1. Prosedur Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak 38

BAB III TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN DALAM

HUKUM PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK 47

1. Konsep Tindaka Pencegahan Terhadap Wajib Pajak 47
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Wajib Pajak dalam Tindakan

Pencegahan 51

1. Sanksi dan Tindakan Penyanderaan Terhadap Pelanggaran dan

 Kecurangan Wajib Pajak 56

1. Proses Pelaksanaan Tindakan Penyanderaan 65

BAB IV PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK 74

1. Peran Direktorat Jenderal dalam Penegakan Hukum Pajak 74
2. Penanganan Kasus Tindak Pidana Penggelapan Pajak oleh Direktorat

Jenderal Pajak 82

1. Kerjasama dan Koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan

Instansi-Instansi 101

1. Evaluasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 104

BAB V PENUTUP 112

1. Kesimpulan 112
2. Saran 113

Daftar Pustaka 116

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.[[1]](#footnote-1) Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang digunakan negara untuk membangun seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Untuk itu diperlukan partisipasi warga negara dengan patuh membayar pajak agar ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan kewajibannya Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas self assessment system.[[2]](#footnote-2) Namun, bukan hal yang mudah bagi negara untuk melakukan pemugutan pajak kepada Wajib Pajak walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat dan di sertai dengan sanksi yang tegas. Sistem pajak yang menggunakan self assessment system sebenarnya memperlunak sifat memaksa dari pajak ini, dengan harapan masyarakat akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Akan tetapi permasalahan yang terjadi justru sebaliknya sistem yang sudah baik ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan penyimpangan karena masyarakat menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Sehingga mereka melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak.

1

Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perpajakan sebenarnya cukup berat dan jelas pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa:[[3]](#footnote-3)

1. Setiap orang yang dengan sengaja:
2. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
4. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
6. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
7. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
8. Tidak menyampaikan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan dan dokumen lain.
9. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau di pungut Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pada Pasal 39A menyatakan bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak,bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti potongan pajak, dan atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti potongan pajak, dan atau bukti setoran pajak.

Meskipun sanksi dari tindak pidana perpajakan sudah secara jelas diuraikan dalam undang-undang, namun tetap saja penegakan hukum terhadap tindak pidana ini belum secara maksimal terlaksanakan. Alasan pentingnya penegakan hukum yaitu karena yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Dengan banyaknya kasus tindak pidana pajak yang terjadi, maka hal inilah yang membuktikan bahwa penegakan hukum yang seharusnya memberikan efek jera dan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana atau kejahatan yang serupa belum berjalan dengan maksimal.[[4]](#footnote-4)

Indonesia termasuk salah satu Negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan dalam pembukan UUD 1945 alenia keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan solial.” Dari uraian tersebut, tampak bahwa negara memerlukan dana untuk kepentingan kesejahteran rakyat. Dana yang akan digunakan ini didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak.

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend, namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.[[5]](#footnote-5) Fungsi budgeter adalah fungsi yang terletak disektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagian tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Fungsi Regulerend adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagi suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi redistribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.[[6]](#footnote-6) Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam perkembangannya yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) banyak orang atau badan hukum yang melakukan kasus-kasus seperti: menyampekan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT), atau sudah menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, membayar pajak lebih ringan, menghindari pembayaran pajak, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang merugikan Negara. Hal itu bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum Pajak (KUP) yakni :[[7]](#footnote-7) Setiap orang yang dengan sengaja:

1. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
4. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
5. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
6. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
7. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.
8. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11).
9. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Bukti bahwa bidang pajak merupakan sektor yang penting untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, dibutuhkan pembangunan dalam segala aspek yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), APBN bersumber dari pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, perorangan, badan hukum dan pihak ketiga yang menjadi sumber utama pendapatan penerimaan keuangan negara sebesar kurang lebih 80%.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pajak yang terhimpun dari masyarakat akan digunakan secara maksimal bagi kepentingan rakyat, penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah tidak henti-hentinya melakukan upaya-upaya agar pendapatan negara yang bersumber dari pajak dapat ditingkatkan demi terciptanya kesejahteraan rakyat di segala bidang. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Negara RI yang tercantum dalam Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara filosofis tersirat makna bahwa telah terjadi perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat sebagai bentuk aktivitas perpajakan dilaksanakan sebagai bentuk peran serta dalam berbangsa dan bernegara. Munculnya kejahatan di bidang perpajakan didasarkan pada kaidah hukum pajak yang berupaya membedakan dalam bentuk seperti “karena kelalaian” atau “dengan kesengajaan”. Adanya perbedaan itu tergantung pada niat dari pelaku untuk mewujudkan perbuatannya yang terjaring dalam kaidah hukum pajak. Sebenarnya kejahatan di bidang perpajakan muncul karena didasarkan pada niat pelakunya saat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Penegakan hukum dalam bidang pajak pada hakikatnya harus berkaitan dengan cita-cita dasar pembentukan ketentuan-ketentuan di bidang pajak. Penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai tindakan memaksa orang untuk mentaati ketentuan yang berlaku akan tetapi lebih bersifat refresif, yakni kemungkinan untuk mempengaruhi orang untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi penyuluhan dan pendidikan pajak bagi masyarakat seharusnya menjadi hal yang tak terpisahkan dari penegakan hukum di bidang pajak. UU RI No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 16 Tahun 2009 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Pengertian dan batasan tindak pidana di bidang perpajakan dan sanksinya secara implisit dapat dilihat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 (1), (2), (3). Jadi UU RI No. 6 Tahun 1983 hanya menentukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, oleh karenanya upaya-upaya penegakan hukum harus mengacu pada ketentuan ini.

Berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 (1), (2), (3) UU RI No. 6 Tahun 1983 telah mengatur dengan jelas ruang lingkup atau batasan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan beserta sanksinya. Penegakan hukum dalam bidang pajak pada hakikatnya harus berkaitan dengan cita-cita dasar pembentukan ketentuan- ketentuan di bidang pajak. Sejak reformasi di bidang perpajakan dengan keluarnya UU No. 6 Tahun 1983, sistem perpajakan nasional menganut prinsip “*Self Assesment*” artinya kepada Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang lebih luas dan dituntut untuk lebih berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam sistem self assesment ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya (jumlah pajaknya yang terutang) ke Direktorat Jenderal Pajak. Sudah barang tentu pemberian kepercayaan itu membawa konsekuensi berupa kewajiban untuk menyatakan dengan benar dan lengkap segala kewajiban perpajakannya, dan kepercayaan ini tidak boleh dilalaikan atau disalahgunakan. Kepercayaan yang sangat besar yang diberikan kepada wajib pajak ini tentunya amat rentan terhadap penyalahgunaan.

Untuk mengimbangi pemberian kepercayaan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berfungsi menjalankan fungsi pengawasan, dan pembinaan atas kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kepercayaan itu. Oleh karena itu pengawasan dan pembinaan menjadi hal yang penting dalam sistem self assesment ini karena tanpa adanya pengawasan yang baik, suatu pemberian kepercayaan akan mudah dilalaikan atau disalahgunakan, dan tanpa adanya pembinaan yang teratur akan menyebabkan Wajib Pajak tidak mengerti kedudukannya, haknya, dan kewajibannyan di bidang perpajakan. Dengan perpaduan antara pemberian kepercayaan dengan pembinaan dan pengawasan diharapkan sistem self assesment dapat berjalan dengan efektif. Namun untuk menjadikan peraturan perpajakan yang berlandaskan sistem *self assesment* tersebut mempunyai nilai dan ikatan untuk diikuti dan ditaati, diperlukan suatu sanksi.

Dengan adanya ancaman sanksi tersebut, Wajib Pajak akan takut untuk mencoba menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan dengan sengaja atau melalaikan kewajiban perpajakannya. Dalam UU Perpajakan dikenal adanya 2 (dua) macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pada dasarnya sanksi administrasi diterapkan dalam hal Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan kepada Wajib Pajak yang telah diketahui melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi belum memenuhi syarat-syarat sebagai tindak pidana di bidang perpajakan. Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh aparat pemerintah di bidang pajak, jadi dilakukan secara langsung tanpa melalui prosedur peradilan. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara berupa bunga, kenaikan atau denda. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) kedudukannya berada di luar sistem peradilan (Kekuasaan Kehakiman), tetapi di bawah kekuasaan eksekutif, akan tetapi sekarang telah diubah menjadi pengadilan pajak berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Perpajakan.

Kedudukan dari pengadilan pajak berada dibawah kekuasaan yudikatif, sehingga pengadilan pajak telah memenuhi syarat sebagai pengadilan murni. Amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Merujuk kepada ketentuan tersebut, pengadilan pajak yang dibentuk berdasarkan UU No. 14 tahun 2002 masih terdapat beberapa persoalan yang harus dicarikan pemecahannya antara lain terkait dengan pengadilan pajak dan sistem satu atap (one roof system). Bahwa hingga saat ini pengadilan pajak belum menerapkan sistem satu atap karena pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan masih dibawah Departemen Keuangan, sementara pembinaan teknis yudisial dibawah Mahkamah Agung. Dalam UU No. 14 tahun 2002 tidak ada pasal yang secara tegas menyebut posisi pengadilan pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman kita apakah termasuk pengadilan khusus, dan berada dibawah peradilan mana.

Bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan di bidang perpajakan akan dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Jadi semua kesalahan pelaku tersebut harus dapat dibuktikan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum di muka hakim atau pengadilan. Oleh karena itu penegakan hukum pidana di bidang perpajakan ini selain dilakukan oleh pegawai pajak sendiri juga melibatkan lembaga penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan memegang peranan yang penting demi suksesnya penanganan tindak pidana di bidang perpajakan ini. Keberhasilan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan suatu delik hukum pajak tidak hanya tergantung pada wewenang yang melekat pada dirinya sebagai penuntut umum, tetapi lebih dari pada itu adalah mengetahui dan memahami ketentuan yang berlaku dalam hukum pajak. Pelanggaran ketentuan yang terdapat dalam hukum pajak dalam melaksanakan wewenangnya dapat berakibat penuntut umum tidak dapat membuktikan tuntutannya di pengadilan.

Hal ini akan berimplikasi terhadap penegakan hukum pada umumnya dan hukum pajak pada khususnya dimana upaya penegakan hukum yang dimaksudkan akan memberi efek jera pada pelaku tindak pidana untuk mengulangi tindakan yang sama tidak tercapai dan pada akhirnya akan merugikan negara karena penuntut umum tidak berhasil untuk mengembalikan kerugian negara yang telah terjadi akibat adanya tindak pidana perpajakan ini.

Berangkat dari permasalahan yang dipaparkan, maka penulis hendak melakukan penelitian komprehensif mengenai, **“Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”.**

1. **PERUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta kewenangan pengadilannya?

Bagaimana tindakan pencegahan dan penyanderaan di dalam hukum pajak terhadap wajib pajak?

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak?
2. **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta kewenangan pengadilannya;

Untuk mengetahui tindakan pencegahan dan penyanderaan di dalam hukum pajak terhadap wajib pajak; dan

1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak.
2. **MANFAAT PENELITIAN**
3. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari judul ini adalah kontribusinya terhadap pengembangan teori hukum pidana. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kejahatan ekonomi dan bagaimana hukum pidana dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Dengan meneliti upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak, dapat diketahui bagaimana aspek hukum pidana diterapkan pada kasus penggelapan pajak. Dalam hal ini, penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum pidana dalam konteks kejahatan ekonomi.

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari judul ini adalah memberikan pandangan mengenai upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong atau mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi pihak terkait, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyusun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, sehingga dapat mengurangi angka penggelapan pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan.

1. **KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Oleh Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak" merupakan penelitian yang orisinal dan baru dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam mengembangkan teori hukum pidana dan memberikan rekomendasi praktis bagi pihak terkait dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang sah dan terpercaya.

1. **KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL**
2. Kerangka Teori

Teori hukum berfungsi memberikan pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis, melalui kegiatan mengaplikasikan teori berkenaan dengan kegiatan praktik hukum yang meliputi: pembentukan undang-undang, peradilan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, melalui penguasaan pada Teori Hukum, kita dapat menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (*menguasai the power of solving of legal problem*) mencakup: kemampuan membuktikan peristiwa-peristiwa konkret, merumuskan masalah hukum (*legal issues*), dan memecahkannya, dan akhirnya membuat putusan (*decision making*).[[8]](#footnote-8) Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian ini maka penulis menggunakan teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana dan teori pembuktian untuk memperjelas dan memecahkan masalah-masalah hukum terkait tema yang peneliti angkat.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, baik oleh petugas penegak hukum ataupun oleh individu yang memiliki kepentingan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penegakan hukum pidana merupakan proses yang terdiri dari serangkaian tahapan, mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terhadap terdakwa, hingga pemasyarakatan bagi pelaku yang terbukti bersalah.[[9]](#footnote-9)

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses mengintegrasikan nilai-nilai yang terdapat dalam aturan-aturan yang kuat dan tindakan dalam rangka memperlihatkan nilai-nilai tersebut dalam tahap akhir. Hal ini dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.[[10]](#footnote-10)

Penegakan hukum pidana adalah proses penerapan aturan pidana oleh aparat penegak hukum. Ini merupakan implementasi dari peraturan pidana yang ada. Oleh karena itu, penegakan hukum adalah sistem yang mengaitkan nilai dengan aturan dan tindakan nyata dari individu. Aturan-aturan tersebut menjadi pedoman atau standar untuk perilaku yang dianggap sesuai. Tujuan dari tindakan atau perilaku tersebut adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketentraman.

Penulis menggunakan teori untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan diimplementasikan dalam masyarakat. Teori ini mencakup berbagai aspek seperti peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Teori ini juga mencakup konsep-konsep seperti efektivitas, keadilan, dan perlakuan yang adil dalam penegakan hukum.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ruang lingkup hukum pidana pada dasarnya membahas tiga masalah sentral dalam hukum pidana, yaitu tentang tindak pidana, tentang pertangungjawaban pidana, dan tentang pidana itu sendiri.[[11]](#footnote-11) Dalam hukum pidana konsep liability atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan tersebut dikenal dengan sebutan mens rea.

Menurut pandangan monistis tentang strafbaar feit atau criminal act berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:

1. Kemampuan bertanggung jawab.
2. Kesalahan dalam arti luar: sengaja dan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan pemaaf.
4. Teori Pembuktian

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara perstiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.

Ada beberapa sistem pembuktian yaitu:[[12]](#footnote-12)

1. Conviction-in Time
2. Conviction-Raisonee
3. Pembuktian Menurut UndangUndang Secara Positif
4. Pembuktian Menurut UndangUndang Secara Negatif

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana , diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:[[13]](#footnote-13)

1. Keterangan sakti
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Katerangan terdakwa
6. **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian berfungsi untuk menghubungkan atau mengkaitkan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya yang ingin diteliti sehingga memperjelas topik yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Oleh Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan hukum secara efektif dan adil, yang meliputi penindakan terhadap pelanggar hukum dan perlindungan hak-hak individu serta masyarakat yang bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam suatu negara atau masyarakat.[[14]](#footnote-14)

1. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan yang dilarang oleh undang-undang. Pelaku bisa berupa individu atau kelompok orang yang melakukan tindakan melanggar hukum, seperti mencuri, membunuh, atau melakukan penipuan.[[15]](#footnote-15)

1. Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuata orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.[[16]](#footnote-16)

1. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah tindakan seseorang atau badan usaha yang dengan sengaja tidak melaporkan atau menyembunyikan informasi yang diperlukan oleh otoritas pajak untuk menghitung pajak yang seharusnya dibayarkan, atau memanipulasi data pajak untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang sebenarnya.[[17]](#footnote-17)

1. Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengumpulan pajak dalam negeri.[[18]](#footnote-18)

1. Upaya

Upaya adalah langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam konteks hukum, upaya seringkali merujuk pada tindakan yang diambil oleh pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas terhadap suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak lain, dan berusaha untuk mengubah keputusan tersebut melalui proses hukum.[[19]](#footnote-19)

1. Kepatuhan

Kepatuhan dalam konteks hukum mengacu pada kesediaan atau kemauan seseorang atau suatu badan usaha untuk mematuhi dan mengikuti peraturan, undang-undang, aturan, atau kebijakan yang berlaku. Kepatuhan seringkali diukur berdasarkan sejauh mana seseorang atau badan usaha patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.[[20]](#footnote-20)

1. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah seseorang atau badan usaha yang diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks hukum perpajakan, wajib pajak merupakan subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan penghasilannya kepada otoritas pajak.[[21]](#footnote-21)

1. **METODE PENELITIAN**
2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan metode analisis terhadap norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum, baik itu dalam bentuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum serta memberikan rekomendasi atau solusi yang sesuai dengan norma hukum tersebut.[[22]](#footnote-22)

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.[[23]](#footnote-23) Sementara pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Penggunaan pendekatan konseptual ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.[[24]](#footnote-24)

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan diperoleh dari berbagai sumber seperti publikasi, dokumen, atau data yang sudah diolah oleh lembaga atau instansi tertentu. Adapun sumber data sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas atau kekuatan yang mengikat secara hukum. Sumber-sumber yang digunakan sebagai bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau laporan dalam proses perundang-undangan, dan keputusan hakim.[[25]](#footnote-25)

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu yang berupa semua publikasi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi itu diantaranya buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini.

1. Bahan Hukum Tertier

Bahan tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini dan kamus hukum.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang akan diolah dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi dokumen.Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh dokumen-dokumen berupa peraturan dalam fatwa yang terkait dengan tindak pidana penggelapan pajak. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat berbagai literatur berupa buku-buku, dokumen, tesis, skripsi, jurnal dan berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode ini sebagai sarana untuk mendapatkan data-data terkait tindak pidana penggelapan pajak dan klarifikasi lapangan yang dianggap perlu dalam penelitian.

1. Analisis Data

Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisis data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatianya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.[[26]](#footnote-26)

1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam Bab I, sebagai bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II dibahas rumusan masalah yang pertama yaitu dasar pertimbangan dimasukkannya penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelaku tindak pidana perpajakan.

Dalam Bab III dibahas rumusan masalah kedua yaitu mekanisme penanganan tindakan pencegahan dan penyandraan di dalam hukum pajak terhadap Wajib Pajak.

Dalam Bab IV dibahas rumusan masalah yang ketiga yaitu sistem pengaturan atau penindakan hukum mengenai pelaku tindak pidana pajak menurut Undang-Undang tindak pidana tentang Ketentuan Umum, Tata Cara dan kewenamgam pengadilan dalan hukum tindak Perpajakan (KUP)/UU Perpajakan.

Dalam Bab V sebagai bab penutup merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan disertakan pula saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

**BAB II**

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP) BESERTA KEWENANGAN PENGADILANNYA**

1. **Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Pajak Menurut Undang-Undang KUP**

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Untuk memastikan pelaksanaan perpajakan yang efektif dan efisien, pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Salah satu masalah dalam perpajakan adalah tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh sebagian wajib pajak.[[27]](#footnote-27)

Tindak pidana penggelapan pajak adalah tindak pidana yang merugikan negara dan dapat dikenakan sanksi pidana.[[28]](#footnote-28) Sangat penting bagi kita untuk memahami pengertian tindak pidana penggelapan pajak menurut Undang-Undang KUP, sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang KUP, tindak pidana penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang sengaja menyembunyikan atau mengurangi pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tindak pidana penggelapan pajak ini dapat dilakukan oleh wajib pajak maupun orang yang tidak memiliki kewajiban pajak.

Sanksi pidana yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat berupa kurungan atau denda. Kurungan yang diterapkan dapat berupa kurungan selama 6 bulan sampai dengan 6 tahun, sedangkan denda yang diterapkan dapat mencapai dua kali jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Selain itu, pelaku tindak pidana penggelapan pajak juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pemotongan sanksi administratif, pencabutan status pengusaha kena pajak (PKP), dan pencabutan izin usaha.

24

Pelaku tindak pidana penggelapan pajak harus diproses secara hukum dan dikenakan sanksi pidana dan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau lembaga penegak hukum lainnya yang berwenang.[[29]](#footnote-29)

1. Tindak Pidana Penggelapan Pajak oleh Wajib Pajak

Tindak pidana penggelapan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak yang sengaja menyembunyikan atau mengurangi pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat melakukan beberapa tindakan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajaknya, antara lain:[[30]](#footnote-30)

1. Mengurangi jumlah penghasilan yang dilaporkan

Pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat mengurangi jumlah penghasilan yang dilaporkan pada SPT tahunan. Hal ini dapat dilakukan dengan memalsukan bukti-bukti pendukung seperti faktur, kwitansi, atau laporan keuangan.

1. Tidak melaporkan penghasilan atau aset yang dimiliki

Pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat tidak melaporkan penghasilan atau aset yang dimilikinya, sehingga pajak yang harus dibayar menjadi berkurang atau tidak dikenakan sama sekali. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu atau menghilangkan aset yang dimilikinya.

1. Menggunakan dokumen palsu

Pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh keringanan pajak atau menghindari kewajiban pajak yang seharusnya harus dibayar. Dokumen palsu yang sering digunakan adalah faktur, kwitansi, dan bukti pembayaran.

1. Menghindari pemotongan pajak

Pelaku tindak pidana penggelapan pajak juga dapat menghindari pemotongan pajak yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti pemotongan pajak penghasilan oleh pengusaha atau pemotongan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memalsukan atau tidak melaporkan jumlah penghasilan atau nilai aset yang dimilikinya.

1. Tindak Pidana Penggelapan Pajak oleh Orang yang Tidak Memiliki Kewajiban Pajak

Tindak pidana penggelapan pajak juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewajiban pajak, seperti wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak atas nama orang lain atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang mengakibatkan terjadinya penggelapan pajak.[[31]](#footnote-31)

Contoh tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewajiban pajak adalah transaksi fiktif atau transaksi dengan tujuan menghindari pajak. Transaksi fiktif adalah transaksi yang tidak memiliki substansi atau tujuan ekonomi yang jelas, namun dilakukan untuk menghindari pajak atau untuk memperoleh keringanan pajak. Sedangkan transaksi dengan tujuan menghindari pajak adalah transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak yang seharusnya harus dibayar.[[32]](#footnote-32)

Tindak pidana penggelapan pajak adalah tindakan yang merugikan negara dan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak maupun orang yang tidak memiliki kewajiban pajak. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak harus dilakukan secara tegas dan efektif untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami pengertian tindak pidana penggelapan pajak menurut Undang-Undang KUP dan mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

1. **Tindakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak**

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting dan berperan dalam pembangunan negara. Pelaksanaan kewajiban pajak oleh wajib pajak menjadi sangat penting. Namun, dalam prakteknya, masih terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, salah satunya dengan melakukan tindak pidana penggelapan pajak.

Tindak pidana penggelapan pajak adalah tindakan merugikan negara dengan cara tidak melaporkan atau mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara. Tindakan ini merugikan negara dan masyarakat luas karena berakibat pada kurangnya dana yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tindakan hukum pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 39, yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan pajak.[[33]](#footnote-33)

Pelaku tindak pidana penggelapan pajak adalah orang atau badan yang dengan sengaja melakukan tindakan untuk tidak membayar pajak atau membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Pelaku tindak pidana penggelapan pajak ini bisa berupa wajib pajak, perantara pajak, atau bahkan pejabat yang bertugas menangani pajak.[[34]](#footnote-34)

Menurut Pasal 39 Ayat (2) KUP, tindak pidana penggelapan pajak dilakukan oleh orang atau badan yang sengaja melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga pajak yang seharusnya dipungut dan disetor ke kas negara tidak dipungut atau tidak disetor seluruhnya atau sebagian. Selain itu, juga termasuk dalam tindak pidana penggelapan pajak adalah orang atau badan yang sengaja mengajukan atau menggunakan surat keterangan palsu, menghilangkan atau memusnahkan bukti-bukti, serta melakukan tindakan lain yang merugikan negara dalam hal perpajakan.

Pasal 39A KUP mengatur bahwa pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat dikenai sanksi administratif berupa pembayaran bunga dan denda. Bunga yang harus dibayarkan paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang dibayarkan dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak dilakukan secara adil dan transparan. Hakim dan jaksa harus bebas dari intervensi politik atau kepentingan pribadi yang dapat menghalangi proses peradilan yang adil. Pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya membayar pajak secara benar dan taat aturan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, workshop, dan seminar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.[[35]](#footnote-35)

Dalam rangka mengurangi kasus penggelapan pajak, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi canggih dalam pelaksanaan perpajakan. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan, sehingga dapat meminimalkan kesempatan bagi para pelaku tindak pidana untuk melakukan penggelapan pajak.[[36]](#footnote-36)

Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan sistem perpajakan yang lebih terintegrasi dan modern, seperti Sistem Informasi Perpajakan Terintegrasi (SIPT). Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak dan dapat mendeteksi kemungkinan adanya penggelapan pajak.

Tindakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak harus dilakukan secara tegas dan konsisten oleh pemerintah. Pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya membayar pajak secara benar dan taat aturan, serta mempertimbangkan penggunaan teknologi canggih dalam pelaksanaan perpajakan. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa kasus penggelapan pajak dapat dikurangi dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkat.[[37]](#footnote-37)

Dalam menangani tindak pidana penggelapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan profesional. Selain itu, dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut di masa depan. Tindakan preventif yang dilakukan antara lain melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, melakukan audit terhadap wajib pajak yang dicurigai melakukan pelanggaran, serta meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang dan aset yang dapat digunakan untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan negara.[[38]](#footnote-38)

Dalam konteks Indonesia, perluasan basis pajak dan peningkatan penerimaan pajak menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah. Untuk itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah kerugian negara akibat kurangnya penerimaan pajak. Dalam hal ini, tindakan hukum yang diambil harus dilakukan dengan tegas dan adil, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat secara keseluruhan.[[39]](#footnote-39)

Tindakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Undang-undang KUP memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai tindak pidana penggelapan pajak serta sanksi hukum yang harus diterapkan. Dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Selain itu, kerja sama dan koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran

1. **Kewenangan Pengadilan dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penggelapan Pajak**

Tindak pidana penggelapan pajak merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Tindak pidana ini merujuk pada perbuatan seseorang yang sengaja menyembunyikan atau mengurangi penghitungan pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Tindak pidana ini termasuk ke dalam kategori tindak pidana pajak dan memiliki sanksi pidana yang cukup berat.[[40]](#footnote-40)

Kewenangan pengadilan sangat penting dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan pajak. Pengadilan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Dalam sub bab ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai kewenangan pengadilan dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan pajak.

Tindak pidana perpajakan masuk dalam yurisdiksi pengadilan pidana. Pengadilan pidana memiliki kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana perpajakan yang melanggar undang-undang perpajakan seperti penggelapan pajak, pemalsuan dokumen perpajakan, atau penghindaran pajak dengan cara yang melanggar hukum. Pengadilan pidana akan memeriksa bukti-bukti dan melakukan persidangan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Apabila terdakwa terbukti bersalah, pengadilan pidana dapat memberikan hukuman pidana seperti penjara, denda, atau kedua-duanya. Sementara yurisdiksi pengadilan pajak mencakup berbagai macam hal yang timbul antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal-hal yang dapat menjadi sengketa antara keduanya adalah pemutusan hubungan kerja Wajib Pajak, kewajiban pemungutan pajak, keabsahan surat ketetapan pajak, penghitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, penerimaan pengembalian pajak, penerapan sanksi administratif dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan, pembebasan pajak atau pengurangan pajak, serta penyelesaian atas keberatan Wajib Pajak atas keputusan DJP mengenai perhitungan atau pemungutan pajak. Pengadilan Pajak juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pajak yang berkaitan dengan tindakan-tindakan DJP dalam melaksanakan tugasnya, seperti tindakan penyitaan atau penyitaan jaminan. Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak untuk melindungi hak-haknya yang terkait dengan tindakan DJP tersebut.[[41]](#footnote-41)

Kewenangan pengadilan dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan pajak tidak diatur secara eksplisit dalam UU KUP. Namun berdasarkan tindak pidana perpajakan yang diatur Pasal 39 UU KUP, penggelapan pajak termasuk salah satu tindak pidana perpajakan yang dapat diproses melalui pengadilan pidana. Selain itu, UU Pajak juga mengatur bahwa tindak pidana perpajakan harus diproses melalui pengadilan pidana. Oleh karena itu, kasus tindak pidana penggelapan pajak akan diproses oleh pengadilan pidana yang memiliki yurisdiksi dalam wilayah tempat terjadinya tindak pidana atau wilayah tempat Wajib Pajak tersebut berdomisili. Namun, tidak semua kasus tindak pidana penggelapan pajak ditangani oleh pengadilan negeri. Terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang dibentuk khusus untuk menangani sengketa perpajakan. Pengadilan pajak ini hanya memiliki kewenangan untuk menangani sengketa perpajakan dan tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana penggelapan pajak.[[42]](#footnote-42)

Pengadilan juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku secara umum dalam memutuskan suatu perkara, termasuk juga aturan perpajakan. Sebagai contoh, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pid.Sus/2018, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 36A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memperoleh penghasilan dalam kurun waktu satu tahun pajak harus melaporkan penghasilannya tersebut ke Kantor Pajak. Terdakwa dianggap telah sengaja mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan penghasilannya, sehingga terbukti melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Pengadilan kemudian memberikan hukuman pidana berupa penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah.[[43]](#footnote-43)

Kewenangan pengadilan dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan pajak juga terbatas oleh kewenangan lembaga lain yang terkait dengan perpajakan. Misalnya, jika terdapat perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan perpajakan antara pengadilan dan Direktorat Jenderal Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan upaya hukum lain, seperti melakukan banding atau kasasi.[[44]](#footnote-44)

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak, perlu adanya kerja sama antara pengadilan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan informasi dan data yang diperlukan oleh pengadilan dalam memutus suatu perkara. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti kepada pengadilan untuk membantu pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Namun, perlu diingat bahwa dalam memberikan keterangan dan bukti-bukti kepada pengadilan, Direktorat Jenderal Pajak harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak harus memastikan bahwa keterangan dan bukti-bukti yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, Direktorat Jenderal Pajak harus memperhatikan kerahasiaan data dan informasi yang dipegang. Direktorat Jenderal Pajak tidak boleh memberikan keterangan atau bukti-bukti yang melanggar kerahasiaan data dan informasi yang dipegang.[[45]](#footnote-45)

Kewenangan pengadilan dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan pajak juga terkait dengan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Menurut Pasal 39 Undang-Undang KUP, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan pajak adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasal** | **Bentuk Sanksi** |
| Pasal 39 Ayat (1) | Pidana penjara paling sedikit 6 bulan, dan paling lama 6 tahun.  |
| Pidana denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar. |
| Pasal 39 Ayat (3) | Pidana penjara paling sedikit 6 bulan, dan paling lama 2 tahun.  |
| Pidana denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi dan pengkreditan yang dilakukan. |

Sanksi pidana tersebut dapat ditingkatkan jika terdapat unsur-unsur yang memberatkan, seperti penggelapan pajak yang dilakukan dalam jumlah yang besar atau melibatkan jaringan kejahatan. Dalam hal ini, pengadilan dapat menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku. Pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek lainnya, seperti alat bukti yang digunakan, keabsahan alat bukti tersebut, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga putusan yang dijatuhkan adalah putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kewenangan pengadilan dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan pajak sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengadilan harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan adalah putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan juga sangat penting untuk memastikan terselenggaranya penegakan hukum yang efektif dalam kasus tindak pidana penggelapan pajak.[[46]](#footnote-46)

Pengadilan juga membutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan hukum dan fakta yang terkumpul. Sebaliknya, Direktorat Jenderal Pajak dapat memanfaatkan putusan pengadilan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan memperbaiki kebijakan perpajakan. Kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan masih terkendala oleh beberapa faktor dalam praktiknya. Salah satunya adalah keterbatasan dalam penyediaan data dan informasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang tentang perlindungan data pribadi dan kerahasiaan perusahaan. Selain itu, pengadilan juga menghadapi tantangan dalam mengakses informasi yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan infrastruktur yang tersedia, serta kekurangan sumber daya manusia dan anggaran.[[47]](#footnote-47)

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan teknologi dan sistem informasi yang dapat memfasilitasi pertukaran data dan informasi secara efektif dan efisien. Selain itu, perlu juga adanya upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang hukum dan teknologi informasi agar dapat memberikan dukungan yang optimal dalam penegakan hukum perpajakan. Penting juga bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan untuk terus memperkuat kerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara kedua belah pihak, serta mengadakan pertemuan dan pelatihan bersama untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penegakan hukum perpajakan.[[48]](#footnote-48)

1. **Prosedur Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak**

Tindak pidana penggelapan pajak diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Tindak pidana ini terjadi apabila wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dengan sengaja mengurangi atau menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. Tindak pidana penggelapan pajak juga dapat terjadi apabila wajib pajak memalsukan dokumen pajak, menyembunyikan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang bertujuan untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, seperti penjara dan denda yang besar.

Prosedur penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak dimulai dari proses penyidikan hingga persidangan di pengadilan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam prosedur penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak:[[49]](#footnote-49)

1. Penyidikan

Penyidikan dalam tindak pidana pajak adalah proses penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh aparat penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau orang lain yang terkait dengan perpajakan. Proses penyidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana perpajakan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Penyidikan dalam tindak pidana pajak diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang berwenang atau masyarakat umum. Setelah menerima laporan atau pengaduan, PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) akan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang ada, seperti dokumen keuangan dan transaksi perusahaan atau individu yang terkait dengan perpajakan. PPNS ini berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Setelah memperoleh bukti-bukti yang cukup, PPNS dapat melakukan penggeledahan atau penyitaan terhadap barang-barang yang terkait dengan dugaan tindak pidana perpajakan. Dalam hal ini, PPNS harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, apabila PPNS telah memperoleh bukti yang cukup dan menetapkan bahwa terdapat dugaan tindak pidana perpajakan, maka PPNS dapat menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses penyidikan dalam tindak pidana pajak berakhir setelah PPNS menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Selama proses penyidikan, PPNS harus memperhatikan hak-hak Wajib Pajak dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

1. Penuntutan

Setelah penyidikan selesai, PPNS akan menyerahkan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang merupakan penuntut umum pada sidang pengadilan pajak. Selanjutnya, JPU akan melakukan penilaian terhadap hasil penyidikan yang diserahkan oleh PPNS.

Pada tahap ini, jaksa penuntut umum akan mengajukan surat dakwaan kepada pengadilan untuk menetapkan jadwal sidang. Surat dakwaan merupakan dokumen yang memuat tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terhadap tersangka. Isi surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat sidang berlangsung, jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana penggelapan pajak dengan alat bukti yang sah dan cukup. Jaksa penuntut umum dapat menggunakan berbagai jenis alat bukti, seperti keterangan saksi, dokumen, atau barang bukti. Sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, tersangka atau kuasanya juga memiliki hak untuk membantah atau membela diri terhadap tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tersangka atau kuasanya dapat menyampaikan eksepsi atau pembelaan dalam bentuk replik, duplik, atau surat permohonan.

Apabila pengadilan memutuskan bahwa tersangka bersalah, maka hukuman yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kasus tindak pidana penggelapan pajak, pasal 39 Undang-Undang KUP menetapkan bahwa pelaku yang terbukti melakukan penggelapan pajak dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak dibayar.

Peran jaksa penuntut umum sangat penting untuk memastikan terlaksananya penegakan hukum yang efektif dalam proses penuntutan. Jaksa penuntut umum harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tindak pidana penggelapan pajak. Selain itu, jaksa penuntut umum juga harus bersikap objektif, profesional, dan berintegritas dalam melakukan tugasnya.

Kolaborasi yang baik antara Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan, serta peningkatan kualitas dan kapasitas jaksa penuntut umum di bidang perpajakan, sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak secara patuh dan tertib juga dapat membantu mengurangi angka tindak pidana penggelapan pajak di Indonesia.[[50]](#footnote-50)

Setelah tahap penuntutan, prosedur penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak selanjutnya adalah proses persidangan. Dalam proses persidangan, hakim akan memeriksa bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh jaksa penuntut umum dan menyimpulkan apakah terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak. Selain itu, dalam proses persidangan, terdakwa juga memiliki hak untuk membela diri dan memberikan keterangan serta bukti-bukti yang mendukung pembelaannya.

Dalam proses persidangan, hakim harus memastikan bahwa proses persidangan berlangsung secara adil dan objektif. Hal ini dilakukan dengan memeriksa bukti-bukti yang diperoleh selama penyidikan dan penuntutan, serta mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang terkait dengan kasus tindak pidana penggelapan pajak. Hakim juga harus memastikan bahwa terdakwa memiliki hak untuk memperoleh pembelaan yang memadai serta mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses persidangan.

1. Putusan

Setelah sidang selesai dilaksanakan, maka pengadilan pajak akan mengeluarkan putusan yang berisi apakah Wajib Pajak terbukti melakukan tindak pidana perpajakan atau tidak. Apabila Wajib Pajak dinyatakan bersalah, maka pengadilan pajak akan memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman yang diberikan dapat berupa denda, pidana penjara, atau keduanya. Hakim juga dapat menetapkan sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha atau pencabutan hak atas pengelolaan keuangan. Namun, jika hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah, maka terdakwa akan dibebaskan dan tidak dikenai hukuman apapun. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak harus menerima keputusan hakim dan tidak dapat melakukan upaya hukum lainnya untuk menuntut terdakwa lagi atas kasus yang sama.

Setelah proses peradilan pidana selesai dan pengadilan telah memutuskan putusan yang memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan putusan pidana tersebut. Pelaksanaan putusan pidana dalam kasus tindak pidana penggelapan pajak sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana benar-benar mendapat sanksi dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana lainnya. Pelaksanaan putusan pidana dalam kasus tindak pidana penggelapan pajak seringkali mengalami kendala, terutama dalam hal pemulihan kerugian negara akibat pajak yang tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana.[[51]](#footnote-51)

Pelaksanaan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pajak dilakukan dengan cara mengeksekusi putusan tersebut. Ekskusi putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pajak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun pelaksanaan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pajak meliputi pembayaran denda dan uang pengganti kerugian negara. Jika pelaku tindak pidana pajak tidak membayar denda dan uang pengganti kerugian negara yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka KPKNL dapat melakukan eksekusi dengan cara melakukan penyitaan dan lelang aset milik pelaku tindak pidana pajak.

Pelaksanaan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pajak juga dapat dilakukan dengan cara membatalkan Surat Keterangan Lapor Pajak (SKLP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini akan mengakibatkan pelaku tindak pidana pajak tidak bisa melaksanakan haknya sebagai wajib pajak. Jika pelaku tindak pidana pajak mengajukan banding atau kasasi terhadap putusan pidana yang dijatuhkan, maka pelaksanaan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pajak ditunda sampai putusan banding atau kasasi dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang.[[52]](#footnote-52)

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan pidana Pelaksanaan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak perlu dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa putusan pidana tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar. Hal ini juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses penegakan hukum di masa yang akan datang.

**BAB III**

**TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN DALAM HUKUM PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK**

1. **Konsep Tindakan Pencegahan Terhadap Wajib Pajak**

Pajak merupakan salah satu pilar penting dalam menghasilkan pendapatan negara guna mendukung berbagai program dan aktivitas pemerintah. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus mematuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, sayangnya tidak semua wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, tindakan pencegahan dalam hukum pajak sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan penghindaran atau penyelundupan pajak oleh wajib pajak. Konsep tindakan pencegahan dalam hukum pajak terhadap wajib pajak merupakan upaya untuk meminimalkan risiko ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.[[53]](#footnote-53)

Tindakan pencegahan dalam hukum pajak meliputi berbagai macam kegiatan, mulai dari penyuluhan, pengawasan, hingga penindakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Berikut ini adalah beberapa konsep tindakan pencegahan dalam hukum pajak terhadap wajib pajak yang perlu diketahui.[[54]](#footnote-54)

1. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan salah satu bentuk tindakan pencegahan dalam hukum pajak. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan konsekuensi yang akan diterima apabila tidak membayar pajak. Penyuluhan juga dapat memberikan informasi kepada wajib pajak tentang cara-cara menghitung dan membayar pajak yang benar.

47

Penyuluhan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti Dinas Pajak, Kementerian Keuangan, atau pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi dalam hal perpajakan. Penyuluhan dapat dilakukan secara langsung atau melalui media sosial, website, atau publikasi lainnya.

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan tindakan pencegahan dalam hukum pajak yang dilakukan untuk memantau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui audit, inspeksi, atau verifikasi. Pengawasan ini bertujuan untuk menemukan potensi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Pengawasan dapat dilakukan oleh Dinas Pajak, Kementerian Keuangan, atau lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam hal perpajakan. Pengawasan dapat dilakukan secara terprogram atau acak, tergantung pada kondisi dan kebutuhan. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem informasi perpajakan yang terintegrasi.

1. Sanksi

Sanksi merupakan tindakan pencegahan dalam hukum pajak yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi dapat berupa denda, bunga, atau bahkan tindakan pidana. Sanksi dapat diberikan setelah proses pengawasan dan pemeriksaan dilakukan dan ditemukan adanya pelanggaran.

Dalam memberikan sanksi, pihak yang berwenang harus memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan wajib pajak secara berlebihan. Sanksi yang diberikan juga harus dapat memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

1. Pemantauan pasca-penyelesaian

Setelah proses pengawasan dan penyelesaian kasus dilakukan, tindakan pencegahan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pemantauan pasca-penyelesaian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak yang sebelumnya melakukan pelanggaran tidak melakukan pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

Pemantauan pasca-penyelesaian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat atau dengan memberikan sanksi tambahan apabila terdapat pelanggaran kembali. Pemantauan pasca-penyelesaian juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem informasi perpajakan yang terintegrasi.

1. Kepatuhan sukarela

Selain melalui tindakan pencegahan yang bersifat represif, pihak yang berwenang juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui tindakan pencegahan yang bersifat preventif. Salah satu tindakan pencegahan yang bersifat preventif adalah dengan mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Kepatuhan sukarela dapat ditingkatkan dengan memberikan insentif bagi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan tarif pajak atau penambahan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik dari pihak yang berwenang.

Saat menerapkan konsep tindakan pencegahan dalam hukum pajak terhadap wajib pajak, penting untuk diingat bahwa pendekatan yang digunakan harus seimbang dan tidak merugikan wajib pajak secara tidak adil. Pihak yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa tindakan pencegahan yang diambil tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau merugikan kepentingan wajib pajak. Selain itu, tindakan pencegahan juga harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, sehingga dapat meminimalkan risiko ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tindakan pencegahan yang dilakukan juga harus didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang memadai, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.[[55]](#footnote-55)

Tujuan utama dari tindakan pencegahan adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Karena itu, perlu ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila tidak mematuhi kewajiban tersebut. Peningkatan kesadaran wajib pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang sistem perpajakan yang berlaku dan manfaat yang diperoleh dari membayar pajak. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, internet, seminar, dan lokakarya.[[56]](#footnote-56)

Pelayanan publik yang baik akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Pelayanan publik yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pihak yang berwenang dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam membayar pajak.Top of Form

1. **Kewajiban dan Tanggung Jawab Wajib Pajak dalam Tindakan Pencegahan**

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dan memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga kestabilan ekonomi negara. Setiap warga negara yang memperoleh penghasilan atau memiliki sumber penghasilan yang wajib dikenakan pajak, memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu. Sebagai warga negara yang baik, setiap wajib pajak juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan agar mereka tidak melakukan pelanggaran atau penipuan dalam pembayaran pajak.

1. Kewajiban Pajak Wajib

Kewajiban pajak wajib termasuk pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemenuhan kewajiban administrasi lainnya. Kewajiban pembayaran pajak harus dilakukan setiap kali wajib pajak memperoleh penghasilan. Pajak dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau transfer bank ke rekening penerimaan pajak. Wajib pajak harus membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terlambat membayar pajak, maka wajib pajak akan dikenakan denda dan bunga yang tinggi.

Wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pendapatan dan pajak yang terutang kepada pihak berwenang. Pelaporan pajak harus dilakukan setiap tahun melalui surat pemberitahuan (SPT) atau formulir lain yang disediakan oleh pihak berwenang. Wajib pajak harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang pendapatan dan pengeluarannya.

Wajib pajak juga memiliki kewajiban administrasi lainnya, seperti pendaftaran pajak, pengaturan faktur pajak, dan pemenuhan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pendaftaran pajak harus dilakukan segera setelah wajib pajak memulai usaha atau memperoleh penghasilan. Faktur pajak harus dikeluarkan untuk setiap transaksi dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

1. Tanggung Jawab Wajib Pajak dalam Melakukan Tindakan Pencegahan

Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan agar mereka tidak melakukan pelanggaran atau penipuan dalam pembayaran pajak. Beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak antara lain:

1. Mengetahui Kewajiban Perpajakan

Wajib pajak harus memahami kewajiban perpajakan mereka secara menyeluruh, termasuk kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan kewajiban administrasi lainnya. Mereka harus memahami ketentuan perpajakan yang berlaku dan memperbarui pengetahuan mereka mengenai perubahan peraturan perpajakan yang terjadi dari waktu ke waktu.

1. Menjaga Bukti Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Wajib pajak harus menjaga bukti pembayaran dan pelaporan pajak mereka dalam kondisi yang aman dan teratur. Mereka harus menyimpan bukti-bukti tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan membantu wajib pajak dalam membuktikan ketaatan mereka terhadap kewajiban perpajakan serta menghindari masalah dengan pihak berwenang.

1. Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Wajib pajak dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Konsultan pajak dapat memberikan saran dan panduan mengenai tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, konsultan pajak juga dapat membantu wajib pajak dalam menghindari potensi masalah perpajakan dan membantu mengatasi masalah yang timbul.

1. Membuat Catatan Keuangan yang Akurat

Wajib pajak harus membuat catatan keuangan yang akurat dan teratur. Hal ini akan memudahkan mereka dalam memastikan bahwa penghasilan dan pengeluaran yang dilaporkan dalam SPT adalah benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Catatan keuangan yang akurat juga akan membantu wajib pajak dalam memantau kinerja keuangan mereka serta mengambil keputusan yang tepat mengenai keuangan.

1. Memperoleh Informasi Mengenai Peraturan Perpajakan yang Baru

Wajib pajak harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang baru. Mereka harus memperoleh informasi mengenai peraturan perpajakan baru yang diterbitkan oleh pihak berwenang serta memperbarui pengetahuan mereka mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka serta menghindari masalah dengan pihak berwenang.

1. Menghindari Tindakan Penipuan atau Pelanggaran Perpajakan

Wajib pajak harus menghindari tindakan penipuan atau pelanggaran perpajakan. Mereka harus menghindari melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak berwenang, seperti menghilangkan atau menyembunyikan penghasilan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang. Tindakan penipuan atau pelanggaran perpajakan dapat mengakibatkan wajib pajak dikenakan sanksi yang berat, termasuk denda dan tindakan hukum.

Wajib pajak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka serta melakukan tindakan pencegahan agar tidak melakukan pelanggaran atau penipuan dalam pembayaran pajak. Kewajiban pajak wajib meliputi pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemenuhan kewajiban administrasi lainnya. Sedangkan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak antara lain adalah mengetahui kewajiban perpajakan, menjaga bukti pembayaran pajak, menggunakan jasa konsultan pajak, membuat catatan keuangan yang akurat, memperoleh informasi mengenai peraturan perpajakan yang baru, dan menghindari tindakan penipuan atau pelanggaran perpajakan.

Wajib pajak harus selalu memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku serta mengikuti perkembangan peraturan dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya. Hal ini akan membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, wajib pajak juga harus menghindari tindakan penipuan atau pelanggaran perpajakan, karena hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang berat bagi mereka.

Penting bagi wajib pajak untuk memahami kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam melakukan tindakan pencegahan. Hal ini akan membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar serta menghindari masalah dengan pihak berwenang. Selain itu, wajib pajak juga dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta memastikan ketaatan mereka terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan. BPKP berfungsi sebagai lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan negara yang bertugas untuk melakukan audit terhadap kinerja keuangan negara, termasuk dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan. BPKP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, serta memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang mengenai tindakan yang harus diambil dalam hal ditemukan pelanggaran atau kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan perpajakan di Indonesia, memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan informasi mengenai kewajiban perpajakan serta memastikan ketaatan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. DJP juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, serta memberikan sanksi dan tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran atau kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Ketika menghadapi pandemi COVID-19 yang baru saja berlalu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan untuk membantu wajib pajak dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Beberapa kebijakan tersebut antara lain pemberian relaksasi perpajakan, pengurangan tarif pajak, dan pengurangan denda pajak. Namun, wajib pajak tetap harus memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara benar dan tepat waktu, meskipun terdapat kebijakan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah.

Salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak ketika menghadapi situasi pandemi COVID-19 adalah dengan memanfaatkan layanan pajak online yang disediakan oleh DJP. Dengan menggunakan layanan ini, wajib pajak dapat melakukan pengajuan dan pembayaran pajak secara online, sehingga dapat menghindari kerumunan di kantor pajak dan mengurangi risiko penularan COVID-19.

Selain itu, wajib pajak juga harus memastikan bahwa catatan keuangan mereka akurat dan teratur. Hal ini akan memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar serta menghindari masalah dengan pihak berwenang. Wajib pajak juga harus memperoleh informasi mengenai peraturan perpajakan yang baru, terutama dalam konteks pandemi COVID-19, sehingga dapat memahami kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dan mengikuti aturan yang berlaku.

Terakhir, wajib pajak harus menghindari tindakan penipuan atau pelanggaran perpajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku serta menghindari praktik-praktik yang tidak benar dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Jika terdapat tindakan penipuan atau pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh pihak lain, wajib pajak juga harus melaporkannya kepada pihak berwenang.

1. **Sanksi dan Tindakan Penyanderaan Terhadap Pelanggaran dan Kecurangan Wajib Pajak**

C.1. Sanksi Terhadap Pelanggaran dan Kecurangan Wajib Pajak

Sanksi merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan kecurangan. KPP berhak menerbitkan sanksi pajak untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem *self assesment*, penting bagi Wajib pajak memahami apa saja kewajiban perpajakan yang harus di lakukan serta memahami sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang tidak dilakukan.

Pada prinsipnya terdapat  2 jenis Sanksi Perpajakan yang ada di Indonesia yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa sanksi bunga, denda maupun kenaikan dari pajak yang kurang di bayar. Sanksi pidana perpajakan terdiri dari sanksi kurungan dan penjara.

1. Sanksi Administrasi
2. Denda Pajak

Denda pajak merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Dalam perpajakan, denda pajak merupakan salah satu bentuk denda administrasi yang dikenakan oleh otoritas pajak atas pelanggaran atau ketidakpatuhan wajib pajak.

Denda pajak diberlakukan sebagai upaya untuk mendorong wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan serta meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Denda pajak biasanya dikenakan terhadap berbagai pelanggaran, seperti keterlambatan atau tidak melaporkan pajak, tidak membayar pajak tepat waktu, atau melakukan pelanggaran lainnya yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Besarnya denda pajak ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang harus dibayar atau nilai pokok pajak yang tidak dilaporkan atau tidak dibayar. Besaran denda pajak yang dikenakan dapat bervariasi tergantung dari jenis pelanggaran dan kebijakan otoritas pajak yang berlaku. Biasanya, semakin serius pelanggaran yang dilakukan, maka semakin besar juga besaran denda pajak yang dikenakan.

Sanksi denda dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak dalam beberapa kasus sebagai berikut; *Pertama*, jika Wajib Pajak terlambat atau tidak melaporkan kewajiban SPT Masa atau SPT Tahunan. *Kedua*, jika pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu. *Ketiga*, jika pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak mengisi faktur pajak secara lengkap kecuali identitas pembeli atau identitas pembeli serta nama dan tanda tangan bagi PKP yang menyerahkan adalah Pedagang Eceran. *Keempat*, jika Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Terakhir, Wajib Pajak melakukan Pengungkapan ketidakbenaran setelah dilakukan Pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan (Pasal 8 ayat (3)) UU KUP. Penting untuk diingat bahwa pengenaan sanksi denda ini tidak selalu dengan diterbitkan STP.

Berdasarkan UU KUP, besaran sanksi denda tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, yaitu: jika wajib pajak terlambat melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan), maka sanksi denda yang dikenakan adalah sebesar Rp 100.000,- untuk SPT Masa selain PPN dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, Rp 500.000,- untuk SPT Masa PPN, dan Rp 1.000.000,- untuk SPT Tahunan Badan. Sanksi denda juga dapat dikenakan jika PKP (Pengusaha Kena Pajak) tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu, membuat faktur yang diisi tidak lengkap selain identitas pembeli, atau melaporkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Dalam hal ini, besaran sanksi denda yang dikenakan adalah sebesar 2% x Dasar Pengenaan Pajak, sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1. Kenaikan Pajak

Sanksi kenaikan dalam perpajakan merupakan salah satu bentuk denda administrasi yang dikenakan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kenaikan pajak dapat dikenakan dalam berbagai situasi, salah satunya adalah ketika wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran setelah dilakukan pemeriksaan namun belum diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak). Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selain itu, sanksi kenaikan juga dapat dikenakan jika wajib pajak telah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti tidak melaporkan pajak atau tidak membayar pajak tepat waktu.

Sanksi kenaikan dalam perpajakan dapat menjadi beban tambahan bagi wajib pajak, karena besaran kenaikan pajak yang dikenakan biasanya ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Besaran persentase yang dikenakan biasanya tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dan kebijakan otoritas pajak yang berlaku.

Sesuai dengan UU KUP, terdapat beberapa situasi yang dapat dikenakan sanksi kenaikan pajak. Pertama, pengungkapan ketidakbenaran setelah dilakukan pemeriksaan namun belum disidik (Pasal 8 ayat (3)). Dalam situasi ini, sanksi yang dikenakan adalah denda sebesar 150% dari pajak yang kurang dibayar. Kedua, pengungkapan ketidakbenaran setelah dilakukan pemeriksaan namun belum diterbitkan SKP (Pasal 8 ayat (5)). Dalam situasi ini, sanksi yang dikenakan adalah kenaikan pajak sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. Selain itu, sanksi kenaikan pajak juga dapat dikenakan dalam SKPKB dan SKPKBT dengan besaran yang berbeda-beda, yaitu kenaikan 50% atau 100% dari pajak yang kurang dibayar.

1. Bunga Pajak

Sanksi bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sanksi ini dapat dikenakan dalam beberapa situasi, di antaranya adalah keterlambatan pembayaran SPT Masa atau SPT Tahunan, keterlambatan pembayaran SPT Masa atau SPT Tahunan karena pembetulan SPT, keterlambatan pembayaran karena perpanjangan SPT Tahunan, keterlambatan pembayaran akibat PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Selain itu, Wajib Pajak juga dapat dikenakan sanksi bunga jika diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29 dan SKPKB/SKPKBT. Sanksi bunga ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang belum dibayar dan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya waktu keterlambatan pembayaran. Jadi, semakin lama pembayaran ditunda, semakin besar pula sanksi bunga yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Selain itu, jika Wajib Pajak terlambat membayar SKPKB, maka akan dikenakan bunga penagihan.

1. Sanksi Pidana

Dalam bidang perpajakan, terdapat sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan. Proses pengenaan sanksi pidana dilakukan setelah adanya pemeriksaan awal bukti permulaan dan dilanjutkan dengan penyidikan. Tindak pidana perpajakan dapat dilakukan dengan tiga alasan, yaitu percobaan, kealpaan, dan sengaja. Kealpaan adalah tindakan yang dilakukan tidak disengaja, seperti lalai, kurang hati-hati, atau tidak mematuhi kewajiban pajak yang berakibat merugikan pendapatan negara.

Bentuk tindak pidana di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

*Pertama*, tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Jenis tindak pidana ini terdapat dalam Pasal 13A dan Pasal 38 UU KUP.

*Kedua*, tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian negara yang terdapat dalam Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP. Tindak pidana tersebut meliputi tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain yang palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

*Ketiga*, tindak pidana percobaan dalam mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak (Pasal 39 (3) UU KUP).

*Keempat*, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang terdapat dalam Pasal 39A UU KUP.

Perlu diperhatikan bahwa tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 40 UU KUP.

Berikut adalah jenis sanksi pidana perpajakan:

1. Denda Pidana

Jika Wajib Pajak terbukti melakukan tindak pidana perpajakan setelah melalui proses penyidikan dan dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan pajak, maka Wajib Pajak akan dikenakan denda pidana yang harus dibayar. Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam hal ini, umumnya denda yang dikenakan paling sedikit 1 atau 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 atau 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Artinya, besarnya denda yang harus dibayar oleh Wajib Pajak bergantung pada jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah dan putusan pengadilan.

1. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah salah satu bentuk pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana perpajakan. Pidana kurungan di sini merujuk pada hukuman penjara yang harus dijalani oleh pelaku tindak pidana perpajakan yang melakukan tindakan kealpaan yang kedua kali. Tindakan kealpaan di sini merujuk pada tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja namun dapat menimbulkan kerugian pada negara.

Biasanya, pidana kurungan yang diberikan sebagai bentuk hukuman atas tindakan kealpaan yang kedua kali memiliki rentang waktu minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun. Artinya, pelaku tindak pidana perpajakan yang melakukan tindakan kealpaan yang kedua kali dan dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan pajak dapat dihukum dengan pidana kurungan selama minimal 3 bulan atau maksimal 1 tahun, tergantung pada keputusan hakim dan keputusan pengadilan pajak.

1. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah hukuman pidana yang diberikan dalam bentuk penahanan terhadap pelaku tindak pidana di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Hukuman pidana ini diberikan bagi pelaku tindak pidana yang sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Umumnya, hukuman pidana penjara yang diberikan atas tindak pidana perpajakan kesengajaan memiliki rentang waktu paling sedikit 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Rentang waktu hukuman ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti beratnya tindakan pidana, besarnya kerugian negara, keadaan pelaku, dan sebagainya. Hukuman penjara ini akan dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana perpajakan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh pengadilan pajak setelah melalui proses persidangan yang adil dan terbuka.

C.2. Tindakan Penyanderaan Terhadap Pelanggaran dan Kecurangan Wajib Pajak

Tindakan penyanderaan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menangkap dan menahan orang yang telah melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum, sebagai jaminan untuk memastikan bahwa orang tersebut menghadiri persidangan atau memenuhi kewajiban hukumnya. Dalam konteks perpajakan, tindakan penyanderaan dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang telah melakukan kecurangan atau pelanggaran hukum dalam membayar pajak mereka.

Dalam konteks perpajakan, tindakan penyanderaan dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang telah melanggar hukum dengan sengaja. Misalnya, jika wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu, atau memberikan informasi palsu atau tidak lengkap dalam laporan pajak mereka, mereka dapat ditindak dengan tindakan penyanderaan.

Tindakan penyanderaan dapat dilakukan oleh pihak berwenang, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum perpajakan di Indonesia. Pihak DJP dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak kepada wajib pajak yang telah melanggar hukum perpajakan, dan jika wajib pajak tidak membayar atau mengajukan banding terhadap surat ketetapan pajak tersebut, maka DJP dapat melakukan tindakan penyanderaan terhadap harta benda wajib pajak.

Wajib pajak yang disandera akan diberikan kesempatan untuk membayar pajak atau memperbaiki kesalahan mereka. Jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka harta benda yang disandera dapat dijual untuk membayar pajak yang belum dibayar. Namun, pihak DJP tidak dapat menjual harta benda yang disandera sebelum ada keputusan pengadilan yang memperbolehkannya.

Tindakan penyanderaan dapat memberikan beberapa keuntungan dalam menangani masalah pelanggaran dan kecurangan perpajakan. Berikut ini adalah beberapa keuntungan tindakan penyanderaan dalam perpajakan:

1. Mendorong Kepatuhan Pajak

Tindakan penyanderaan dapat menjadi bentuk hukuman yang efektif bagi wajib pajak yang enggan memenuhi kewajibannya secara tepat waktu atau memberikan informasi yang tidak benar. Tindakan penyanderaan dapat mendorong kepatuhan pajak, karena wajib pajak yang tahu bahwa tindakan penyanderaan dapat dilakukan terhadap mereka, akan lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat.

1. Membantu Memulihkan Kerugian Negara

Tindakan penyanderaan dapat membantu memulihkan kerugian negara akibat pelanggaran atau kecurangan perpajakan. Dengan mengeksekusi harta benda wajib pajak, pemerintah dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

1. Mengurangi Kemungkinan Kecurangan dan Pelanggaran Berulang

Tindakan penyanderaan dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk tidak melakukan kecurangan atau pelanggaran perpajakan di masa depan. Karena mereka telah mengalami akibat yang merugikan akibat tindakan mereka, maka kemungkinan mereka akan mengulanginya menjadi lebih kecil.

1. Menyamakan Peluang Bagi Wajib Pajak yang Taat

Tindakan penyanderaan dapat membantu menyamakan peluang bagi wajib pajak yang taat dengan mereka yang tidak taat. Dengan menindak wajib pajak yang melanggar hukum, maka wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat tidak akan dirugikan, dan mereka akan merasa dihargai karena kepatuhan mereka.

1. **Proses Pelaksanaan Tindakan Penyanderaan**

Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga penyanderaan atau Paksa Badan sudah dikenal cukup lama pada zaman penjajahan Belanda. *Gijzeling* berasal dari Bahasa Belanda yang artinya sandera atau penyanderaan. Dalam ketentuan HIR/RBg, *gijzeling* diartikan dengan istilah penyanderaan, yaitu menahan pihak yang kalah di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk memaksanya memenuhi putusan hakim. Pihak yang kalah tersebut dapat disandera apabila barang-barang untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan tidak ada atau tidak cukup.[[57]](#footnote-57)

Jika tidak ada atau tidak cukup barang-barang untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim, maka ketua pengadilan negeri atau jaksa yang dikuasakan atas permohonan tertulis atau lisan pihak yang dimenangkan, dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat yang berwenang melakukan pekerjaan -jurusita untuk menyandera debitur.

Berdasarkan ketentuan dalam HIR dan RBg di atas, dapat diambil unsur-unsur *gijzeling* sebagai berikut: [[58]](#footnote-58)

* 1. Penyanderaan dilaksanakan dengan cara memasukkan atau menahan pihak yang kalah ke dalam lembaga pemasyarakatan.
	2. Penyanderaan dilaksanakan dengan tujuan agar pihak yang kalah memenuhi putusan pengadilan.
	3. Penyanderaan dapat dilakukan apabila barang-barang untuk menjalankan pelaksanaan putusan pengadilan tidak ada atau tidak cukup.

Adapun pengertian *gijzeling* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2000 bahwa gijzeling diartikan dengan istilah “Paksa Badan”, yaitu upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.[[59]](#footnote-59)

Adapun pengertian lain menurut UU Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 2000 bahwa *gijzeling* yaitu pengekangan sementara waktu kebebasan. Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.[[60]](#footnote-60) Dari pengertian-pengertian diatas terdapat perbedaan pengertian, naming pada hakikatnya sama-sama mendefiniskan gijzeling merupakan upaya pengekangan sementara waktu terhadap debitur untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya kepada kreditur.

*Gijzeling* diatur dalam Pasal 209 sampai 224 HIR atau pasal 242 sampai dengan 258 RBg. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan pelaksanaan keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk melaksanakan surat sita guna menyendera debitur. Menurut ketentuan tersebut, yang disita bukanlah barang, melainkan orang dan berkaitan dengan hubungan antara debitur dan kreditur secara hukum perdata.[[61]](#footnote-61) Dalam ketentuan HIR maupun RBg juga diatur lama penyanderaan dapat ditentukan sesuai dengan besar kecilnya jumlah yang harus dipenuhi oleh debitur dan juga diatur mengenai persyaratan usia, kondisi, di mana sesorang tidak dapat disandera, tempat penyanderaan, wewenang penyanderaan, dan sebagainya.[[62]](#footnote-62)

Penegakan hukum melalui lembaga sandera dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang merupakan dasar hukum pelaksanaan sandera bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dalam Pasal 1 angka 21 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dinyatakan bahwa “Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu”.

Untuk menelusuri latar belakang gijzeling dalam penegakan hukum pajak, terlebih dahulu harus dibahas tentang hubungan antara kreditur dan debitur dalam hukum pajak. Dalam hubungan hukum tersebut terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak yang berhak atas prestasi dan pihak yang berkewajiban memberi prestasi. Maksud prestasi di sini bukan hanya berupa uang, tetapi obyek apa saja asal tidak melanggar atau tidak dilarang oleh hukum, artinya dapat berupa penyerahan barang atau berkewajiban melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hubungan antara kreditur dan debitur seperti itu diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan.[[63]](#footnote-63)

Dalam suatu hubungan hukum perikatan, suatu pihak pada suatu saat dapat menjadi pihak yang berhak, dan pada saat lain dapat juga menjadi pihak yang berkewajiban. Dalam hukum pajak, yang dimaksud degan hubungan hukum adalah hubungan antara pemungut pajak sebagai kreditur dan penanggung pajak sebagai debitur. Debitur akan menjadi pihak yang berkewajiban jika ia melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak pada saat yang telah ditentukan.

Data yang ada menunjukkan bahwa tunggakan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hingga September tahun 2000 yang lalu, tunggakan pajak di pusat adalah sebesar Rp15.036,9 miliar atau 14,82% dari rencana penerimaan Pajak tahun 2000, ini merupakan jumlah yang signifikan.[[64]](#footnote-64) Mengingat peran penerimaan pajak begitu penting, sedangkan tunggakan makin banyak, maka salah satu cara yang diambil pemerintah untuk mencairkan tunggakan adalah melalui penagihan hingga tuntas, dengan cara antara lain melalui penyanderaan (gijzeling). Kebijakan tersebut kemudian diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, pada tanggal 20 Desember tahun 2000.

Pelaksanaan gijzeling dalam hukum pajak dilakukan dengan prosedur sebagai berikut;

1. Izin Penyanderaan

Penyaderaan dapat dilakukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dengan syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah (Rp 100.000.000,00);
2. Diragukan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan pajaknya;
3. Setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada wajib pajak;
4. Telah mendapat izin terulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.[[65]](#footnote-65)

Adapun kriteria penanggung pajak yang diragukan itikad baiknya berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf d Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-218/PJ/2003 disebutkan tentang petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baiknya, yaitu sebagai berikut;[[66]](#footnote-66)

* 1. penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak;
	2. penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;
	3. penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;
	4. penangung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
	5. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
	6. penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

Penyanderaan dilakukan dengan permohonan izin penyanderaan yang diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah. Permohonan izin penyanderaan memuat identitas, jumlah utang yang belum dilunasi, tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan dan uraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak. Surat perintah penyanderaan diterbitkan oleh pejabat seketika setalh diterimanya izin tertulis dari menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penangihaj daerah.

1. Tempat Penyaderaan

Wajib pajak atau penanggung oajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu yang memenuhi syarat-syarat;

1) Tertutup dan terasingdari masyarakat;

2) Mempunyai fasilitas terbatas;

3) Mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Jika tempat penyanderaan belum ada, maka dititipkan pada rumah tahanan Negara. Tempat penyanderaan di rumah tahanan Negara dipisahkan dengan tahanan lain. Pada dasarnya, antara penyanderaan dan tahanan mempunyai kesamaan bahwa mereka dihilangkan kebebasaanya dengan ditempatkan di tempat yang terasing, perbedaanya pada tindakan penyanderaan, penghilangan kebebasan penanggung pajak. Apabila Kementrian Keuangan belum memiliki tempat khusus untuk penyanderaan di wilayah penanggung pajak, maka penanggung pajak ditempatkan di rumah tahanan Negara setempat.

1. Pelaksanaan Penyanderaan

Penyanderaan mulai dilakukan pada saat surat perintah penyaderaan diterima oleh penanggung pajak yang bersangkutan. Dalam hal ini juru sita dapat menitipkan Penanggung Pajak yang disansera berdasarkan Surat Perintah Penyaderaan yang diternitkan oeh pejabat yang berwenang ke Rumah Tahanan Negara.

1. Jangka Waktu Penyaderaan

Penyanderaan dilakukan selama-lamanya 6 (enan) bukan terhitung sejak penanggung pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan berikutnya. Penentuan lamanya penyanderaan didasarkan pada; perhiutngan besarnya hutang, besarnya jumlah harta yang disembunyikan, dan hubungan harta yang disembunyikan tersebut dengan itikad tidak baik penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya.

1. Penghentian Penyaderaan

Penyaderaan dapat dihentikan dengan syarat apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyaderaan telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Penerapan sanksi paksa badan (*gijzeling*) kepada penanggung pajak dalam hukum pajak adalah penerapan pidana administrasi yang menekankan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan.[[67]](#footnote-67) Tindakan penyanderaan sebenarnya bukan suatu hukuman pidana penjara sebagaimana yang ada di dalam hukum pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Dalam hukum administarsi, memaksa (*bestuurdwang*) adalah untuk mengusahakan terpenuhinya suatu kewajiban yang tidak dipenuhi atau tidak dilakukan oleh wajib pajak.[[68]](#footnote-68)

Pelaksanaan paksa basan dikenakan kepada penanggung pajak apabila upaya hukum administrasi yang lainnya secara maksimal telah dilakukan secara keseluruhan menurut prosedur, syarat, dan sistem yang telah ditentukan sebelumnya tetapi tidak mendapatkan hasil dalam penerapan dengan demikian sanksi penyanderaam imi alkam ditetapkan sebagai sanksi akhir. Tindakan penyanderaan menjadi upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan penahanan atau sandera karena “penanggung pajak tidak membayar hutang pajaknya”.

Dapat dipahami bahwa penyanderaan di sini adalah sebagai salah satu upaya *law enforcement* dari pemerintah untuk menarik pajak. Upaya paksa penagihan pajak tersebut diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.[[69]](#footnote-69) Pelaksanaan paksa badan (*gijzeling*) dilakukan, agar menimbulkan efek jera kepada masyarakat, perlu diberitakan secara luas sehingga perlu mengundang awak media untuk menyebarluaskan pemberitaan tentang *gizjeling*.

**BAB IV**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK**

1. **Peran Direktorat Jenderal dalam Penegakan Hukum Pajak**

Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.[[70]](#footnote-70) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timpal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluran umum.[[71]](#footnote-71)

DJP disebut sebagai penegak hukum dikarenakan DJP merupakan instansi pemerintah yang memiliki sebagian kewenangan bersifat yudikatif. Sifat yudikatif yang melekat pada DJP di antaranya kewenangan mengenai: Pertama, dapat melakukan dan mencari bukti permulaan awal bila disinyalir adanya dugaan tindak pidana perpajakan.[[72]](#footnote-72) Kedua, dapat menjadi Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya (KUHAP dan UU KUP). Ketiga, dapat melakukan penyitaan melalui Jurusita Pajak kepada penanggung pajak, penerbitan surat paksa yang bersifat eksekutorial agar wajib pajak/penanggung pajak membayar pajak, dapat melakukan penyitaan untuk menguasai barang penanggung pajak, dapat melakukan tindakan Lelang, Pencegahan, dan Penyanderaan (UU No. 19/2000).

Penggunaan istilah “transformatif”, dikarenakan sistem hukum publik yang berlaku dan diterapkan di Indonesia cenderung tidak kaku, malah fleksibel dan bersifat dinamis, terutama tentang pengertian para penegak hukum. DJP sebagai penegak hukum transfomatif harus diakui keberadaannya dalam sistem hukum di Indonesia sejajar dengan penegak hukum lainnya dikarenakan sifat dan kewenangannya sebagian bersifat yudikatif.

74

Kata “transformatif” digunakan dengan bersumber pada *transformation rules* yang bermakna peraturan-peraturan untuk mengubah rangkaian perurutan atau penambahan dari kata-kata dalam suatu kalimat.[[73]](#footnote-73) Kedua, bersumber dari transitoir yang artinya hukum peralihan yaitu hukum yang mengatur masa peralihan/ pergantian di antara dua buah peraturan.[[74]](#footnote-74)

DJP sebagai penegak hukum transformatif patut didukung dengan penguatan melalui payung hukum yang kuat. Konstitusi sudah secara eksplisit memerintahkan, bahkan terdapat kata pamungkas dalam pengertian pajak pada Pasal 23A khususnya pada frasa “…bersifat memaksa”. Kata ini nuansanya hanya dapat dilakukan oleh otoritas hukum. Maka, sudah selayaknya DJP sebagai institusi penegak hukum transformatif dengan kewenangan yang begitu besar untuk menerima pendapat negara yang bersumber dari pajak, sepatutnya dibuatkan UU tersendiri khusus mengenai eksistensi DJP.

Selama ini, peran dan kewenangan DJP hanya sebagian saja. Tidak secara utuh disebut dalam UU, baik yang terdapat dalam (UU KUP, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU PPh, UU PPN & BM, dst.) Mengenai pengaturan terkait peran, kewenangan, dan Kode Etik DJP, lebih banyak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Padahal, sudah sepatutnya DPR dan Presiden bersama-sama melaksanakan amanat Konstitusi Pasal 23A. Agar pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia berjalan maksimal, maka keberadaan DJP harus diberi payung hukum melalui UU yang secara khusus tersendiri.

Eksistensi DJP sebagai penegak hukum transformatif, sebagian tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pertama, DJP sebagai penegak hukum transformatif dapat memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak (Pasal 29 UU KUP). Kedua, DJP atas jabatannya dan/atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi dan/atau menghapus sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan), baik karena kekhilafan wajib pajak dan/atau bukan karena kesalahannya (Pasal 36 ayat 1 UU KUP).

Ketiga, DJP sebagai penegak hukum transformatif dapat melakukan penyegelan dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu demi kelancaran pembayaran pajak (Pasal 30 UU KUP). Keempat, anggota DJP sebagai penegak hukum transformatif dapat bertindak sebagai penyidik, apabila diperlukan untuk mengusut dan menindaklanjuti tindakan dan/atau perbuatan wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan (Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 UU KUP).

Kelima, DJP sebagai penegak hukum transformatif memiliki kesamaan dengan penegak hukum lainnya di Indonesia. Kesamaan tersebut ialah, DJP memiliki kode etik profesi sebagaimana penegak hukum lainnya seperti (Advokat, Polisi, Jaksa, dan Hakim).

Kode etik DJP dibuat oleh Menteri Keuangan, dan DJP wajib menaati keseluruhan yang tertuang dalam kode etik tersebut (Pasal 36B UU KUP).

DJP sebagai penegak hukum transformatif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak kebal hukum. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penegak hukum lainnya (seperti Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim dan Sipir). Konsep ketidakkebalan hukum dibuat dan diberlakukan agar para penegak hukum (termasuk DJP) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan/atau perbuatan sewenang-wenang (*Abuse of Power* dan/atau *Abuse of Institution*).

DJP sebagai penegak hukum transformatif dibatasi kewenangannya serta diatur di dalam UU KUP. Antara lain, pertama, DJP dapat dikenai sanksi apabila terbukti lalai dalam menghitung dan/atau menetapkan pajak bagi para wajib pajak (Pasal 36A ayat 1). Kedua, anggota/ Pegawai DJP apabila bertindak di luar tugas dan kewenangannya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 36A ayat 2). Ketiga, anggota/ Pegawai DJP terbukti melakukan pemerasan terhadap para wajib pajak, maka dapat dipidana sesuai Pasal 368 KUHP (Pasal 36A ayat 3). Keempat, anggota/Pegawai DJP apabila terbukti menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum maka dapat dipidana Pasal 12 UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 36A ayat 4).

Peran DJP sebagai penegak hukum transformatif bertambah kuat dengan berlakunya UU No. 9/2017, ketika DJP dapat secara aktif dan leluasa mendapatkan dan menerima akses informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain terkait. Hal ini, meminimalisasi terjadinya tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh para wajib pajak dan/atau penanggung pajak.

Banyak kasus terjadi, dimana para wajib pajak dan/atau penanggung pajak menghindari pembayaran pajak dengan cara melakukan tindakan pencucian uang dengan membuat rekening yang bersifat Private Banking. Kebanyakan private banking dilakukan dan disimpan di bank-bank luar negeri, meskipun tidak dipungkiri juga ada di bank-bank dalam negeri.[[75]](#footnote-75)

Sebelum berlakunya UU No. 9/2017, DJP kesusahan untuk dapat mengakses rekening wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang bersifat *Private Banking* tersebut. Dengan belakunya UU No. 9/2017, maka DJP dapat leluasa untuk mengaksesnya, tidak hanya rekening yang bersifat *Costumer Banking*, dan/atau *Corporate Banking*, melainkan pula akses terhadap *Private Banking* (Pasal 2 Ayat (1), Perpu No. 1/2017 jo. UU No. 9/2017).

Kewenangan dan tugas baru DJP sebagai penegak hukum transformatif sesuai ketentuan UU No. 9/2017 yang disarikan dalam bentuk narasi menjadi 9 (sembilan) item. Pertama, DJP bertugas menerima dan memperoleh informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan (perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU tentang Otoritas Jasa Keuangan) dan dari Entitas lain (legal person seperti perseroan terbatas atau yayasan, atau non-badan hukum legal *arrangement* seperti persekutuan atau *trust*) dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan (Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1), beserta Bagian Penjelasan).

Kedua, DJP berwenang mendapatkan akses Informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian interna sional di bidang perpajakan (Pasal 2 Ayat (1)).

Ketiga, Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada DJP dengan syarat dan ketentuan : (a) laporan yang berisi informasi keuangan sesuai stan dar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan; (b) laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan selama satu tahun kalender; (c) Laporan yang berisi informasi keuan- gan paling sedikit memuat: identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo, atau nilai rekening keuangan; dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan (Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3)).

Keempat, DJP memiliki kewenangan untuk meminta kepada Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain agar laporan keuangan yang didokumentasikan dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, harus memberikan terjemahan dokumentasi yang dimaksud ke dalam Bahasa Indonesia (Pasal 2 Ayat (7)).

Kelima, DJP memiliki tugas menerima laporan keuangan dari Lem baga Jasa Keuangan dan Entitas lain dengan cara: (a). dilakukan secara langsung melalui mekanisme non-elek- tronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia dengan estimasi waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun kalender; (b) dilakukan melalui Otoritas Jasa Keuangan apabila mekanisme elektronik dapat tersedia, dengan estimasi waktu dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada DJP paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasi- onal di bidang perpajakan (Pasal 3 Ayat ( 1) huruf a dan b, Pasal 3 Ayat (3) huruf a dan b, serta Pasal 3 Ayat (4)).

Keenam, DJP berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dibutuhkan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain. Dengan demikian, Mutatis-Mutandis Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain wajib memberikan Informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dibutuhkan kepada DJP (Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2). Ketujuh, seluruh informasi keuan- gan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain digunakan sebagai basis data perpajakan DJP (Pasal 4 Ayat (3)).

Kedelapan, apabila Pimpinan dan/atau Pegawai dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain tidak mematuhi ketentuan di dalam UU tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan ini, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain secara kelembagaan, dapat dipi- dana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Bagi setiap orang atas pernyataan palsu, penyembunyian, atau pengurangan infor masi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan keuangan kepada DJP, dapat pula dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) (Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)).

Kesembilan, dalam hal Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain terhalang untuk memberikan laporan keuangan kepada DJP dikarenakan kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, kewajiban meraha- siakan tersebut tidak berlaku dalam melak- sanakan Undang-Undang ini (Pasal 2 Ayat ( 8) dan Pasal 8).

Terkait hambatan-hambatan atas pelaksanaan tugas dan wewenang baru DJP sebagai penegak hukum transformatif untuk mendapatkan dan menerima akses informasi keuangan dan/atau laporan keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain dikarenakan terhalang oleh ketentuan UU lain, maka sudah diantisipasi oleh UU No.9/2017.

Antisipasi dini yang termuat di dalam UU No.9/2017 agar tugas dan wewenang baru DJP sebagai penegak hukum tranformastif untuk mendapatkan dan menerima Informasi dan/atau laporan keuangan berjalan efektif, maka dimuat klausul yang terdapat di dalam (Pasal 8), dimana segala aturan yang menghambat dinyatakan tidak berlaku.

Aturan-aturan yang menghambat dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan UU No. 9/2017, antara lain: Pertama, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Kedua, Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketiga, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Keempat, Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Kelima, Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

1. **Penanganan Kasus Tindak Pidana Penggelapan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak**

Proses penegakan hukum tindak pidana penggelapan pajak di mulai dari tahap penyidikan, proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal pajak harus progresif dan dapat menegakkan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang, dalam hal Penyidik pegawai negeri sipil di dalam penegakan hukum pidana di atur secara khusus di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah: Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang, Sedangkan proses penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berarti:[[76]](#footnote-76) “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.[[77]](#footnote-77)

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Sedangkan menurut Pasal I angka 31 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pengertian penyidikan adalah sebagai berikut: “Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya”. Berdasarkan pengertian di atas sangat jelas dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama dari dilakukanya proses penyidikan adalah untuk menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan.



 Sumber: Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 272/PJ/2022 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, sebelum memasuki penyidikan pajak terlebih dahulu melewati proses kegiatan sebelum penyidikan.[[78]](#footnote-78) Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa alur pemeriksaan pajak oleh DJP dimulai dengan penugasan dan instruksi pemeriksaan pajak kepada petugas pemeriksa pajak yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tertentu. Selanjutnya, petugas pemeriksa pajak melakukan perencanaan sistem pemeriksaan pajak yang akan dilakukan dan menentukan jenis dokumen dan informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan.

Setelah perencanaan sistem selesai, DJP akan menerbitkan surat perintah dan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak yang akan diperiksa. Selanjutnya, petugas pemeriksa pajak akan meminta untuk meminjam dokumen dari wajib pajak untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan berlangsung. Setelah itu, petugas pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap dokumen dan informasi yang telah diperoleh dari wajib pajak, serta melakukan pengecekan terhadap kelayakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, DJP akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang berisi hasil pemeriksaan pajak dan tanggapan wajib pajak terhadap hasil pemeriksaan tersebut.

Selanjutnya, dilakukan pembahasan pemeriksaan antara petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak, dimana wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan melaporkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Terakhir, setelah selesai pembahasan, dilakukan pengembalian dokumen, pelaporan, dan penetapan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atau pengembalian pajak yang akan diterima oleh wajib pajak.

Dengan dilakukannya penyidikan, maka ditemukan cukup barang bukti untuk menemukan tersangka, diharapkan adanya barang bukti yang ditemukan untuk kemudian menjadi dasar dalam menetapkan tersangka. Dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, pihak yang berweanag untuk melakukan proses penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang perpajakan sesuai Pasal 44 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagi berikut: Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:[[79]](#footnote-79)

1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. menghentikan penyidikan; dan/atau
11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam peroses penyidikan, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Sesuai Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut: “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Apabila diperlukan penyidik dapat meminta batuan aparat penegak hukum lainnya demi kelancaran proses penyidikan. Sesuai Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagi berikut: “Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud padaAyat(1),penyidik
dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.” Tata cara penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pajak, dapat disebutkan sebagai berikut:

* 1. Penyidik pajak harus memperlihatkan Surat perintah Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah;
1. Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyampaikan Hasil Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri;
3. Bila penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan, terlebih dahulu harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak;
4. Dalam melakukan penggeledahan atau penyitaan harus ada 2 orang saksi;
5. Membuat Berita Acara Sita serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Penyidik Pajak;
6. Bila tersangka dikhawatirkan akan meninggalkan wilayah Indonesia maka penyidik pajak dapat segera meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencekalan.
7. Penyidik menyelesaikan penyusunan berkas perkara yang terdiri dari :
8. Berita Acara Pendapat/Resume
9. Penyusunan isi Berkas
10. Pemberkasan

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan. Tahapan-tahapan tersebut adalah:[[80]](#footnote-80)

1. Tahap Pengamatan.

Pengamatan di definisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Direktorat Jenderal Pajak untuk mencocokan dengan kenyataan, membahas dan mengembangkan lebih lanjut akan informasi, data, laporan dan/atau pengaduan yang memberi petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

1. Pemeriksaan Bukti

Permulaan Pemeriksaan bukti permulaan dimaksudkan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan pada dasarnya adalah pemeriksaan pajak dimana pedoman dan tata caranya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan. Setelah selesai pemeriksaan bukti permulaan selanjutnya dibuat Laporan Bukti Permulaan dengan disertai kesimpulan dan usul tindak lanjutnya kepada pejabat yang berwenang atau yang memberi perintah.

1. Tahap Penyidikan termasuk Pembuatan Berita Acara dan Pemberkasan

Apabila dari pemeriksaan bukti permulaan kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, maka atasan pemeriksa pajak setelah menilai dan memberikan pertimbangan atau usul pemeriksa, mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat untuk dilakukan penyidikan melalui Direktur Pemeriksaan Pajak. Setelah Direktur Jenderal Pajak mempelajari dan mempertimbangkan usul Direktur Pemeriksaan Pajak, selanjutnya memberi instruksi untuk melanjutkan penyidikan. Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Setelah penyidik pajak menerima Surat Perintah Penyidikan, kewajiban yang mula mula harus dilakukan adalah memberitahukan saat dimulainya penyidikan kepada Jaksa/Penuntut Umum melalui Penyidik Polri. Selanjutnya mulailah Penyidik Pajak melakukan tindakan penyidikan di bidang perpajakan, dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu KUHAP.

Sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang, Penyidik Pajak juga dapat melakukan tindakan-tindakan hukum seperti:

* 1. Pemanggilan Tersangka dan Saksi
	2. Penggeledahan
	3. Penyitaan

Penghentian Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak Setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pajak, dapat dihentikan dalam hal-hal sebagai berikut:

* + 1. Tidak terdapat bukti yang cukup, atau
		2. Peristiwa bukan merupakan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan, atau
		3. Tersangka meninggal dunia, atau
		4. Peristiwanya telah kadaluarsa, atau
		5. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Namun demikian, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, disebutkan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. Penghentian ini hanya dapat dilakukan dengan syarat:

1. Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan;

2. Wajib Pajak membayar sanksi adminstrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka kewajiban Penyidik adalah memberitahukan hal itu kepada Penyidik Polri, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada tersangka atau keluarganya.

Penuntutan dalam tindak pidana perpajakan tetap mengacu terhadap ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 14, yang menjelaskan sebagai berikut:Penuntut umum mempunyai wewenang:

* + 1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
		2. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
		3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
		4. membuat surat dakwaan;
		5. melimpahkan perkara ke pengadilan;
		6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
		7. melakukan penuntutan;
		8. menutup perkara demi kepentingan hukum;
		9. mengadakan tindakan lain dalam Iingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
		10. melaksanakan penetapan hakim.

Dalam praktek, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan, penuntut umum mempelajari berkas perkara dan dalam waktu 7 (tujuh) hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan telah siap dilimpahkan ke pengadilan atau masih harus dilengkapi lagi.

Apabila belum lengkap, maka berkas perkara dikembalikan ke penyidik untuk diengkapi dengan dijelaskan hal-hal yang dianggap kurang. Jika kemudian telah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, maka penuntut umum segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan dan memohon kepada pengadilan agar segera diadili dengan disertai Surat Dakwaan. Turunan surat pelimpahan perkara beserta Surat Dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasa hukumnya atau penasehat hukumnya dan kepada penyidik POLRI.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP yang mengatur tentang sistem peradilan pidana, kewenangan sebagai penyelidik diserahkan sepenuhnya kepada POLRI. Dengan kata lain setiap anggota POLRI, baik itu pengemban fungsi Intel, Samapta, Bimnas maupun Reserse dapat melaksanakan fungsi penyelidikan. Pengertian penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Penyidik dapat digolongkan menjadi dua antara lain:[[81]](#footnote-81)

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Penyidik pegawai negeri sipil atau yang disingkat PPNS, dan Penyidik Pembantu yang adalah juga pejabat kepolisian.

Wewenang Penyidik di dalam Pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangakan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam hal tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penununtut umum. Penyidik sebagaimana yang dimaksud mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) dua ayat ( 2 ) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Demikian halnya dengan pelaksanaan penyidikan dalam kasus penggelapan pajak maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada pokoknya Penyidik PPNS Dirjen Perpajakan harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Contoh Kasus Penggelapan Pajak yakni:[[82]](#footnote-82) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239.K/PID.SUS/2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana tersangka harus membayar denda sebesar Rp 2.519.955.391.304 (Dua trilliun lima ratus Sembilan belas milliard Sembilan ratus lima puluh lima juta tigaratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kronologi Kasus adalah sbb:[[83]](#footnote-83)

PT Asian Agri Group (AAG) adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik Sukanto Tanoto. Menurut majalah Forbes, pada tahun 2006 Tanoto adalah keluarga paling kaya di Indonesia, dengan kekayaan mencapai US$ 2,8miliar (sekitar Rp 25,5 triliun). Selain PT AAG, terdapat perusahaan lain yang berada di bawah naungan Grup Raja Garuda Mas, di antaranya: Asia Pacific Resources International Holdings Limited(APRIL), Indorayon, PEC-Tech, Sateri International, dan Pacific Oil &Gas. Secara khusus, PT AAG memiliki 200 ribu hektar lahan sawit, karet, kakao di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Di Asia, PT AAG merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar, yaitu memiliki 19 pabrik yang menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah selain tiga pabrik minyak goreng.

Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG, bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto (Vincent) membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai US$3,1 juta pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai group financial controller di PT AAG yang mengetahui seluk- beluk keuangannya. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Vincent diburu bahkan diancam akan dibunuh. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Dalam pelariannya inilah terjadi jalinan komunikasi antaraVincent dan wartawan Tempo. Pelarian VAS berakhir setelah pada tanggal 11 Desember 2006 ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jawa. Namun, sebelum itu, pada tanggal 1 Desember 2006 VAS sengajadatang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapidengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul “AAA-Cross Border Tax Planning (Under Pricing of Export Sales)”, disusun pada sekitar 2002.

Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT AAG secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AA sebagian adalah perusahaan fiktif.

Pembeberan Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Direktorat Pajak karena memang permasalahan PT AAG tersebut terkait erat dengan perpajakan. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Jendral Pajak, DarminNasution, kemudian membentuk tim khusus yang terdiri atas pemeriksa, penyidik dan intelijen. Tim ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejaksaan Agung.

Tim khusus tersebut melakukan serangkaian penyelidikan termasuk penggeladahan terhadap kantor PT AAG, baik yang di Jakarta maupun di Medan.Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut (14 perusahaan diperiksa), ditemukan Terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).selain itu juga “bahwa dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi. Yang berupa menggelembungkan biaya perusahaanhingga Rp 1,5 triliun. mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. Mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Lewat modus ini, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agriyang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005.

Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. Dari rangkaian investigasi dan penyelidikan, pada bulan Desember 2007 telah ditetapkan 8 orang tersangka, yang masing-masing berinisial ST, WT, LA, TBK, AN, EL, LBH, dan SL.Kedelapan orang tersangka tersebut merupakan pengurus, direktur dan penanggung jawab perusahaan.

Pihak Departemen Hukum dan HAM telah melakukan tindakan pencekalan terhadap 8 orang tersangka. Dalam perkara yang sama, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis terhadap perusahaan kelapa sawit ternama, Asian Agri, untuk membayar denda sebesar Rp2,5 triliun kepada negara. Selain itu, Suwir Laut, Tax Manager dari Asian Agri juga dijatuhi hukuman percobaan pidana selama 2 tahun dengan syarat khusus agar perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group membayar sejumlah 2 x Rp 1.259.977.695.652 = 2.519.955.391.304. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, dalam pernyataannya kepada wartawan pada tanggal 28 Desember 2012, Suwir Laut tidak akan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun jika tidak melakukan tindakan serupa selama 3 tahun ke depan.

Adapun fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa adanya SPT dari 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung di dalam ASEAN AGRE GROUP (AAG) pada tahun pajak 2002, 2003, 2004,2005 telah diisi secara tidak benar dan tidak lengkap, di dalam semua SPT tertulis belum diaudit, meskipun fakta sesungguhnya telah diaudit, akibatnya pendapatan Negara yang seharusnya diterima menjadi berkurang, sebagai akibat adanya SPT yang isinya tidak benar oleh AAG, sehingga menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pajak total seluruhnya berjumlah Rp. 1.259.977.695.652,- yang rinciannya adalah dari tiga jenis komponen PPh, WP Badan, PPh WP Orang/Pribadi dan PPh, WP Luar Negeri Tahun 2002,2003, 2004, 2005 sebagai berikut : tahun 2002 Rp. 276.145.706.827,- +tahun 2003 Rp. 296.172.548.868,- + tahun 2004 Rp. 478.385.792.915,- + tahun 2005 sebesar Rp. 246.235.801.943,- ; Sedangkan menurut perhitungan fiskus dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- yang dalam hal ini jumlahnya lebih besar perhitungan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Mengacu pada hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap aktivitas Terdakwa terhadap 14 perusahaan yang tergabung dalam ASEAN AGRE GROUP, ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan penjualan di bawah pasar, hedging aktif, dan membebankan biaya yang disebut sebagai biaya Jakarta dan Management Fee. Akibatnya, SPT tidak dibuat atau diisi berdasarkan laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik, meskipun sebenarnya perusahaan telah diaudit dan laporan hasil audit telah disusun, termasuk tanda "Tidak di audit" yang dicantumkan, meskipun perusahaan telah diaudit. Selain itu, SPT yang diajukan ke KPP berbeda dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik. Dengan mempertimbangkan modus operandi yang disebutkan dan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan terencana, yang merupakan salah satu bentuk modus operandi penghindaran pajak "TAX EVASION."

Dengan menghubungkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas dengan sistem perpajakan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut adalah "self assessment." Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan melaporkan jumlah pajak terutang dengan cara yang benar dan itikad baik dalam SPT kepada KPP setempat. Pentingnya itikad baik yang harus dipraktikkan oleh Wajib Pajak atau kuasanya adalah menjadi bagian dari aspek kepercayaan yang terkandung dalam "*self assessment*", sehingga secara bertahap akan diberikan pendekatan administratif dalam proses penyelesaian masalah perpajakan yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, sejak tahun 2005, Terdakwa tidak melakukan pembayaran pajak atau mengikuti program pengampunan. Baru pada tahun 2008, PT. AAG mengajukan surat permohonan beraudensi dengan Direktur Jenderal Pajak melalui surat AAG tanggal 07 Januari 2008, surat AAG No. 016/JKT/IIS-EXT/I/08 tanggal 17 Januari 2008, dan surat No. 035/JKT/IISEXT/I/08 tanggal 25 Januari 2008. PT. AAG juga memohon pemaparan perkara dan menerbitkan SKP kurang bayar, meskipun masalah PT. AAG sedang dalam tahap penyidikan dan tidak dapat diselesaikan secara administratif, kecuali jika pajak terutang dilunasi.

Setelah mempertimbangkan ketentuan Pasal 44B Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan dan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar, Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun Direktorat Jenderal Pajak melakukan proses penyidikan, hal tersebut masih termasuk dalam lingkup pembinaan sesuai dengan persyaratan limitatif tertentu yang diatur oleh Pasal 44B tersebut. Dalam kepentingan penerimaan Negara, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan dan hanya dapat dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, serta ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Dengan demikian, peluang bagi Wajib Pajak atau kuasanya sejak dimulainya proses penyidikan hingga diajukannya perkara pidana pajak tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan masalah perpajakan yang muaranya berbasis pada tindak pidana perpajakan. Kehilangan peluang penyelesaian secara administratif tersebut mengindikasikan pengabaian peluang proses penyelesaian secara administrasi. Oleh karena itu, adalah tepat jika Direktorate Jenderal Pajak memilih dan menempuh "law enforcement" untuk menegakkan ketentuan perpajakan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum tanpa mengabaikan prinsip ultimum remidium.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan di atas, dapatlah dikemukakan bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum merupakan argumen yang sah. Hal ini disebabkan karena JudexFacti melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dan terutama dalam hal penegakan hukum, mengingat fakta hukum yang telah jelas bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan seperti yang tercantum dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Karena itu, MA mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair atas dakwaan primair yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf C jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: (1) setiap orang; (2) dengan sengaja; (3) menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; (4) dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara; dan (5) dilakukan secara berlanjut.

Menurut MA, putusan ini termasuk sebagai perkara penggelapan pajak yang diputuskan sebagai *corporate liability* (pertanggung jawaban kolektive) yaitu *fucarious liability* (perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan pidana karyawannya). Perkara yang mengantongi nomor perkara 2239.K/PID.SUS/2012 diputus pada 18 Desember 2012 dengan ketua majelis hakim Djoko Sarwoko, Prof. Komariah E, Sapardjaja, dan Sri Murwahyuni.

Putusan tersebut sangat menarik bahwa meskipun penggelapan pajak dianggap sebagai administrasi pidana dan penghukuman dianggap sebagai langkah terakhir, Majelis Kasasi langsung memutuskan bahwa tindakan terdakwa yang memasukkan data palsu (*self-assessment*) sebagai kejahatan pajak, karena tindakan tersebut melanggar prinsip hukum pajak yang menuntut pelaporan kewajiban pajak yang jujur oleh pihak terkait (terdakwa telah mengisi data palsu untuk kewajiban pajak perusahaannya). Menurut MA, perbuatan terdakwa dilakukan selama 4 tahun berturut-turut yang dilakukan oleh 16 anak perusahaan Asian Agri.

Dalam petikan putusannya, MA menyatakan bahwa terdakwa Suwir Laut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan /Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut. Oleh karena itu, terdakwa dipidana penjara 2 tahun dan mensyaratkan dalam 1 tahun sebanyak 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG yang pengisian SPT Tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 kali pajak terutang dengan jumlah total sebesar Rp 2,5 triliun secakwa telah lunas membayar denda tersebut.

1. **Kerjasama dan Koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Instansi-Instansi**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu unit esensial di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi penerimaan negara melalui administrasi perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, DJP harus memastikan bahwa seluruh wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang benar dan tepat waktu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, DJP terus berupaya untuk menjalin kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, asosiasi, dan pihak lain yang terlibat dalam masalah perpajakan. Dalam hal ini, DJP percaya bahwa kerja sama yang baik dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, integritas, dan keadilan dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan di Indonesia.[[84]](#footnote-84)

Salah satu pihak terkait yang bekerja sama dengan DJP adalah instansi pemerintah seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. DJP bekerja sama dengan instansi ini untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam masalah perpajakan serta membantu proses identifikasi dan pencegahan kejahatan perpajakan.[[85]](#footnote-85)

Selain instansi pemerintah, DJP juga bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi asosiasi sebagai penghubung antara DJP dan anggota asosiasi yang merupakan wajib pajak.

Dalam upaya menjaga keadilan administrasi perpajakan, DJP bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mahasiswa, dan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas DJP. Selain itu, DJP juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak secara benar dan proporsional.

Dalam keseluruhan kerja sama tersebut, DJP berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menghimpun penerimaan negara yang optimal dan menjalankan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Dengan kerja sama ini diharapkan dapat tercipta sinergi dan kerjasama yang baik dalam rangka mewujudkan tujuan bersama untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.[[86]](#footnote-86)

Sebagai sumber utama penerimaan pemerintah, pajak memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Optimalisasi pemungutan pajak menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan 78 pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Tujuan dari perjanjian kerja sama tersebut adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi perpajakan, data perizinan, dan data atau informasi lainnya.

Perjanjian kerja sama ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan perpajakan kepada masyarakat, meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan, dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan aparatur di bidang perpajakan.

Melalui kerja sama ini, DJP dapat menerima sumber data yang penting untuk pengawasan kepatuhan pajak antara lain data kepemilikan dan omzet usaha, data izin mendirikan bangunan, data usaha pariwisata, data usaha pertambangan, data usaha perikanan, dan data usaha perkebunan. Sebaliknya, pemerintah daerah juga akan menerima data dari DJP untuk kepentingan pengawasan daerah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengapresiasi partisipasi yang besar dari para kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan walikota dalam mendukung upaya optimalisasi pengumpulan pajak pusat dan pajak daerah. Selain itu, DJP memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah bersedia memfasilitasi kerja sama dengan para pemerintah daerah ini.[[87]](#footnote-87)

DJP berharap program ini dapat segera diikuti oleh seluruh pemerintah daerah karena memberikan manfaat yang besar bagi upaya pengumpulan penerimaan pajak, baik pusat maupun daerah, yang lebih optimal dan berkelanjutan. Sebagai sumber utama penerimaan pemerintah pusat dan daerah, pajak tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik tetapi juga untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan program kesejahteraan sosial yang sangat dibutuhkan khususnya di masa pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu, penting untuk memaksimalkan pengumpulan pajak agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

1. **Evaluasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Direktorat Jenderal Pajak**
	* 1. **Evaluasi**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Sebagai warga negara yang baik, kita diharapkan mematuhi kewajiban pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, tidak semua orang patuh membayar pajak, bahkan ada yang dengan sengaja menggelapkan pajak yang seharusnya mereka bayar. Tindakan ini dapat membahayakan keuangan negara dan mempengaruhi stabilitas ekonomi negara.[[88]](#footnote-88)

Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelaku penggelapan pajak. DJP sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penerimaan pajak, mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penggelapan pajak.

Penggelapan pajak adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sengaja atau tanpa sengaja dengan maksud untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan. Tindakan ini melanggar undang-undang perpajakan dan dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara.[[89]](#footnote-89)

Tindakan penggelapan pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mengabaikan kewajiban perpajakan, tidak melaporkan penghasilan yang seharusnya dilaporkan, atau mengajukan pengurangan pajak yang tidak seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, seorang pengusaha dapat melakukan penggelapan pajak dengan cara tidak melaporkan seluruh penghasilannya dan hanya melaporkan penghasilan yang lebih kecil agar tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar.

DJP memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penggelapan pajak. DJP bertugas untuk menindak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.[[90]](#footnote-90)

Dalam melaksanakan tugasnya, DJP bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus penggelapan pajak. DJP juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus penggelapan pajak, mengumpulkan bukti-bukti, dan mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku penggelapan pajak.

Evaluasi kinerja DJP dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penggelapan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kerja DJP dalam menegakkan hukum. Beberapa hal yang perlu dievaluasi kinerja DJP dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penggelapan pajak antara lain:[[91]](#footnote-91)

1. Mendeteksi Kasus Penggelapan Pajak

Salah satu tugas DJP dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak adalah mendeteksi kasus-kasus penggelapan pajak. DJP menggunakan berbagai cara untuk mendeteksi kasus penggelapan pajak, antara lain dengan melakukan pemeriksaan pajak, audit pajak, dan pengolahan data. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam upaya mendeteksi kasus penggelapan pajak, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki DJP.

Sebagai solusi atas kendala tersebut, DJP perlu melakukan pembenahan dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.[[92]](#footnote-92) DJP juga perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka mendeteksi kasus penggelapan pajak, seperti dengan Kementian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

1. Mengumpulkan Bukti

Setelah mendeteksi adanya dugaan tindak pidana penggelapan pajak, DJP perlu mengumpulkan bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, DJP bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam mengumpulkan bukti, terutama dalam hal kerjasama antara DJP dengan kepolisian dan kejaksaan. Beberapa kasus penggelapan pajak tidak dapat ditindak lanjuti karena kepolisian dan kejaksaan tidak bekerja sama dengan baik dalam hal pengumpulan bukti. Selain itu, terdapat juga kendala dalam hal perlindungan saksi dan pengaduan dari masyarakat.[[93]](#footnote-93)

Untuk meningkatkan kinerja DJP dalam mengumpulkan bukti, perlu dilakukan perbaikan dalam hal kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. DJP juga perlu meningkatkan perlindungan bagi saksi dan pengadu agar tidak merasa takut untuk memberikan informasi terkait kasus penggelapan pajak.

1. Penuntutan Kasus Penggelapan Pajak

Setelah berhasil mengumpulkan bukti yang cukup, DJP perlu menindak lanjuti kasus penggelapan pajak dengan cara melakukan penuntutan melalui pengadilan. Meskipun DJP telah melakukan tuntutan terhadap sejumlah pelaku penggelapan pajak, namun masih terdapat kendala dalam hal lamanya proses penuntutan dan rendahnya tingkat vonis yang diberikan oleh pengadilan.[[94]](#footnote-94)

Untuk meningkatkan kinerja DJP dalam penuntutan kasus penggelapan pajak, perlu dilakukan pembenahan dalam hal koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan. DJP juga perlu meningkatkan kemampuan penyidik dan jaksa dalam hal penyusunan dakwaan dan tuntutan agar dapat memberikan bukti yang cukup kuat dalam persidangan.

1. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu faktor penting dalam pencegahan tindak pidana penggelapan pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. DJP telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, antara lain dengan melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pemberian sanksi. Meskipun demikian, masih terdapat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesulitan dalam proses pembayaran pajak, ketidakpuasan terhadap pelayanan DJP, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak.[[95]](#footnote-95)

Untuk meningkatkan kinerja DJP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu dilakukan perbaikan dalam hal pelayanan dan pengawasan. DJP juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak dan dampak positif yang dapat diberikan bagi pembangunan negara. Selain itu perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain:[[96]](#footnote-96)

1. Meningkatkan kerjasama antara DJP dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pengumpulan bukti dan penuntutan kasus penggelapan pajak.
2. Meningkatkan perlindungan bagi saksi dan pengadu agar tidak merasa takut untuk memberikan informasi terkait kasus penggelapan pajak.
3. Meningkatkan kemampuan penyidik dan jaksa dalam hal penyusunan dakwaan dan tuntutan agar dapat memberikan bukti yang cukup kuat dalam persidangan.
4. Meningkatkan pelayanan dan pengawasan DJP terhadap wajib pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
5. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak dan dampak positif yang dapat diberikan bagi pembangunan negara.
6. Memperkuat peraturan perundang-undangan terkait penggelapan pajak dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku tindak pidana penggelapan pajak.

Terakhir, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak, perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kinerja DJP dalam memberantas tindak pidana penggelapan pajak. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh lembaga independen atau badan pengawas lainnya yang memiliki kompetensi dalam hal pengawasan kinerja DJP.

* + 1. **Pengawasan**

Untuk mencegah tindakan penggelapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Karena itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap kinerja DJP dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak.

Pengawasan terhadap kinerja DJP dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat dilakukan melalui beberapa aspek, seperti peran DJP dalam mencegah penggelapan pajak, proses penyidikan dan penuntutan, serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak.[[97]](#footnote-97)

Dalam mencegah tindakan penggelapan pajak, DJP memiliki peran penting dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan dampak negatif dari penggelapan pajak. Selain itu, DJP juga harus melakukan pengawasan terhadap pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memastikan bahwa laporan pajak tersebut benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, DJP harus memperkuat kerjasama dengan lembaga lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sharing informasi dan koordinasi antar lembaga untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak.

Setelah terjadi penggelapan pajak, DJP harus melakukan proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Proses ini dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam proses penyidikan, DJP harus memberikan dukungan dan bantuan kepada aparat penegak hukum dalam hal pengumpulan bukti dan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, DJP juga harus memberikan keterangan ahli mengenai perhitungan pajak yang diperlukan dalam proses penyidikan.[[98]](#footnote-98)

Selain memberikan dukungan dalam penyidikan, DJP juga harus memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DJP harus memastikan bahwa pelaku tindak pidana penggelapan pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada penyelewengan atau pelanggaran hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Dalam proses penuntutan, DJP juga harus memberikan dukungan kepada Kejaksaan dalam hal penyusunan dakwaan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak. DJP harus memberikan keterangan ahli mengenai perhitungan pajak yang dikelola oleh pelaku tindak pidana penggelapan pajak.

Setelah melalui proses penyidikan dan penuntutan, pelaku tindak pidana penggelapan pajak harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi perdata. Sanksi administratif dapat dikenakan oleh DJP kepada wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dengan cara tidak membayar pajak atau memberikan informasi yang salah dalam pengisian laporan pajak. Sanksi administratif ini dapat berupa denda atau sanksi lain yang diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.[[99]](#footnote-99)

Sanksi pidana dapat dikenakan oleh Kejaksaan kepada pelaku tindak pidana penggelapan pajak yang telah melanggar ketentuan perpajakan dengan sengaja. Sanksi pidana ini dapat berupa hukuman penjara atau denda yang diatur dalam Undang-Undang Pajak yang berlaku. Sanksi perdata dapat dikenakan oleh DJP atau pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan penggelapan pajak. Sanksi perdata ini dapat berupa ganti rugi atau tuntutan lain yang diatur dalam Undang-Undang Pajak yang berlaku.

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DJP dan Kejaksaan harus memastikan bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana penggelapan pajak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan pajak.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Setelah melalui analisis dan evaluasi yang mendalam, dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat ditindak secara hukum melalui proses peradilan pidana. KUP menegaskan bahwa tindak pidana penggelapan pajak merupakan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda dan/atau hukuman penjara. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk mengusut dan menindak tegas pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Jika terjadi pelanggaran, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Oleh karena itu, tindakan hukum yang tegas dan adil harus dilakukan untuk menindak para pelaku tindak pidana penggelapan pajak, sehingga dapat memberikan efek jera kepada masyarakat dan menegakkan keadilan dalam dunia perpajakan;
2. Tindakan pencegahan dan penyanderaan merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menjaga kepatuhan para wajib pajak. Dalam hukum pajak, pencegahan dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak, termasuk dengan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan informasi potensi pelanggaran pajak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan penggelapan pajak oleh para wajib pajak. Selain pencegahan, penyanderaan juga dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap para wajib pajak yang dianggap melakukan pelanggaran pajak yang serius dan menimbulkan kerugian besar bagi negara. Penyanderaan dapat dilakukan dengan cara membekukan rekening bank atau aset-aset lain yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Tindakan penyanderaan bertujuan untuk memaksa para wajib pajak untuk membayar pajak yang seharusnya dibayarkan dan menegakkan keadilan dalam dunia perpajakan; dan

112

1. Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak di Indonesia. Dalam upaya penegakan hukum ini, Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai tindakan seperti pengumpulan data dan informasi, penyelidikan, pengambilan tindakan administrasi, serta penindakan melalui jalur hukum. Melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, Direktorat Jenderal Pajak mampu memperkuat upaya penindakan terhadap pelaku penggelapan pajak. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, pelaku tindak pidana penggelapan pajak dapat dihukum secara tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak sangatlah penting dalam menjaga kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
2. **Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak harus dilakukan secara tegas dan adil. Untuk itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap para wajib pajak untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan pajak. Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan pajak agar masyarakat memahami bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Direktorat Jenderal Pajak juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak, termasuk menggali informasi tentang potensi pelanggaran pajak. Peningkatan kewaspadaan ini dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan pajak dan memudahkan pengusutan jika terjadi pelanggaran. Selain itu, pengadilan perlu memberikan sanksi yang tegas dan adil kepada para pelaku tindak pidana penggelapan pajak agar dapat memberikan efek jera kepada masyarakat dan menegakkan keadilan dalam dunia perpajakan. Dengan tindakan yang konsisten dan tegas terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat penerimaan negara dari sektor pajak;
2. Dalam rangka mencegah tindakan pelanggaran pajak, tindakan pencegahan seperti audit dan pemeriksaan rutin perlu dilakukan terhadap wajib pajak. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak. Namun, dalam kasus-kasus tertentu di mana terdapat indikasi pelanggaran pajak yang serius, tindakan penyanderaan dapat dipertimbangkan sebagai upaya penegakan hukum. Namun, tindakan ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan dengan memperhatikan hak-hak wajib pajak yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu terus memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran dan menjamin hak-hak wajib pajak; dan
3. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih ditingkatkan dengan beberapa saran yang dapat dilakukan. Pertama, perlu ditingkatkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan aparat penegak hukum lainnya agar penindakan terhadap pelaku penggelapan pajak dapat lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik. Kedua, perlu dilakukan sosialisasi secara lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya patuh terhadap kewajiban perpajakan dan bahaya dari pelanggaran tersebut. Selain itu, pemberian sanksi administratif yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan dapat menjadi jalan alternatif untuk mencegah tindakan penggelapan pajak. Terakhir, pemanfaatan teknologi digital dalam pengumpulan data dan informasi dapat mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku penggelapan pajak. Dengan demikian, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta penerimaan negara dari sektor perpajakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Adji, Indrianto Seno, *Hukum Pidana Perpajakan: Pelanggaran Administrasi Pajak dan Tindak Pidana Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Bungin, Burhan, *Metodologi penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Diana, Anastasia dan Lilis Setawati, *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: Andi, 2014.

Djazuli, Ahmad, *Hukum Pidana Pajak dalam Perspektif Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019.

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Gallo, John N., *Effective Law-Enforcement The Technique For Reducing Crime* Journal of Criminal Law and Criminology,Chapter 1, 1998.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Heryanto, Edi, *Teori dan Praktik Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

116

Hidayat, M.A., *Teori dan Praktik Penegakan Hukum Pajak*, Jakarta: Kencana, 2019.

Husen, Harun M., *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burtono, *Hukum pajak teori,analisis dan perkembangannya*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Kartono, Kartini dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, Bandung: Pionir Jaya, 2003.

Kusumaningrum, Febrianti, *Penggelapan Pajak: Analisis Hukum Pidana dan Aspek Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2017.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2020.

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Pujianto, Abdul, *Pengawasan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam Penegakan Hukum Pajak*, Jakarta: Grasindo, 2017.

Rusjdi, Muhammad, *PPSP: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: Indeks, 2007.

Santoso, Sani Imam, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan*, Jakarta: Penaku, 2014.

Sarwono, Sarlito W., *Penegakan Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Simorangkir, J.C.T., et. al, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1980

Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Sirait, Timbo Mangaranap, *Hukum Pidana Pajak (Materiil dan Formil)*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983.

Soemitro, Rochmat, *Asas-asas Hukum Perpajakan*, Bandung: Binacipta, 1991.

Sri, Pudyatmoko, Y, *Penegakkan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta: Salemba, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suhariyono, *Hukum Pidana Pajak: Aspek Hukum Pajak dan Tindak Pidana Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo, 2017.

Surjoputro, Djoko Slamet, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2009.

Suroyo, Winarto, *Reformasi Perpajakan: dari Ideologi ke Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Sutaryo dan Margono Slamet, *Pajak dan Sistem Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2018.

Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011.

Wibowo, Wahyu, *Hukum Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2019.

Wijayanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Yusuf, Ahmad, *Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

**JURNAL**

Amalia, Rizki, *Tindakan Pencegahan Pelanggaran Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol. 4, No. 2, 2019.

Amin, Syaifuddin, *Pelayanan Perpajakan yang Profesional dan Berkeadilan*, Jakarta: Kencana, 2019.

Astrianti, Anggita, *Peran Direktorat Pajak dalam Pencegahan Praktik Penggelapan Pajak*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4, No. 2, 2019.

Fathoni, Muhammad Ibnu, *Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 2, 2015.

Handayani, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Pajak di Indonesia*, Jurnal Hukm dan Peradilan, Vol. 5, No. 1, 2016.

Hidayah, Nur, *Tindak Pidana Penggelapan Pajak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perpajakan di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3, No. 3., 2016.

Hidayah, Khoirul dan Mudawamah, *Gizjeling dalam Hukum Pajak di Indonesia Kajiaan Perundang-undangan dan Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2015.

Ismail, Tjip, *Penyanderaan sebagai Upaya Law Enforcement*, Majalah Hukum Bisnis, 15 September, 2001.

Kusumawati, R.A., *Urgensi Kewenangan Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17, No. 1, 2017.

Mudzakkir, *Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, No. 1, 2011.

Naibaho, Artha Poltak, dkk, *Paksa Badan (Gijzeling) sebagai Instrumen Penagihan Pajak (Kajian Yuridis dari Perspektif Hukum Pidana)*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 3, 2016.

Oktaviani, Bella, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collabarotor Tindak Pidana Penggelapan Pajak di Indonesia*, Recidive, Vol. 5 No. 1, 2016.

Purwaningsih, Sri, *Tindak Pidana Penggelapan Pajak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Justicia, Vol. 13, No. 2, 2015.

Rastiti, Ni Made Ayu, *Eksekusi Perkara Tindak Pidana Pajak Oleh Kejaksaan Tinggi Bali (Studi Putusan Pengadilan No: 123/Pid.Sus/2020/PN.DPS)*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 9, 2022.

Ridwan, Muhammad, *Tindakan Pencegahan dalam Penegakan Hukum Pajak*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2019.

Rohman, Abdul, *Analisis Implementasi Koordinasi Antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pemerintah Daerah dalam Pengumpulan Penerimaan Pajak Daerah*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 8, No. 1, 2020.

S., Wibisono, *Penggelapan Pajak dan Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak*, Jurnal Hukum dan Peradaban, Bol. 17, No. 2. 2015.

Sihombing, Roni, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penggelapan Pajak Menurut Undang-Undang KUP*, Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol. 6. No. 2, 2018.

Sirait , Resmaya Agnesia Mutiara, *Pelaksanaan Kebijakan Penyanderaan Pajak (gijzeling) dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, SASI, Vol. 26, No. 1, 2020.

Sudaryanto, Tri, *Analisis Pelaksanaan Koordinasi Antara Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Pemeriksaan Pajak*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 21, No. 3, 2019.

Susanti, Suryani, *Penegakan Hukum Pidana Pajak oleh Pengadilan Pajak dalam Rangka Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 9, No. 1, 2018.

Sutrisno, *Penggelapan Pajak: Suatu Tindak Pidana yang Merugikan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 4, No. 1, 2014.

Utami, Dewi Putri, *Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8, No. 1, 2019.

**PERATURAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

PERMA Nomor 1Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan

**WEBSITE**

www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 01 Maret 2023, Pukul 16:18 WIB.

1. Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-1)
2. Antori Royan Adyan, Op.cit, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [↑](#footnote-ref-3)
4. John N.Gallo, “ Effective Law-Enforcement The Technique For Reducing Crime”, Journal of Criminal Law and Criminology,Chapter 1, 1998, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wirawan B.Ilyas dan Richard Burtono, Hukum pajak teori,analisis dan perkembangannya (Jakarta: Salemba Empat 2013), hlm.13. [↑](#footnote-ref-5)
6. Djoko Slamet Surjoputro, Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, (Jakarta : Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2009), hlm 3. [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-undang No.28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan [↑](#footnote-ref-7)
8. I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, Teori-teori Hukum, Hal. 9-10 [↑](#footnote-ref-8)
9. Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 58. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, hal. 35. [↑](#footnote-ref-10)
11. Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-11)
12. Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-12)
13. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 259 13 Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sarlito W. Sarwono, *Penegakan Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hal. 12. [↑](#footnote-ref-14)
15. Edi Heryanto, *Teori dan Praktik Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 25. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hal. 92. [↑](#footnote-ref-16)
17. Suhariyono, *Hukum Pidana Pajak: Aspek Hukum Pajak dan Tindak Pidana Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo, 2017, hal. 67. [↑](#footnote-ref-17)
18. Wahyu Wibowo, *Hukum Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2019, hal. 122. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2020, hal. 46. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.*, hal. 53 [↑](#footnote-ref-20)
21. Suhariyono, Op.Cit., hal. 54 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal. 47. [↑](#footnote-ref-22)
23. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hal 22. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*, hal 137-138. [↑](#footnote-ref-24)
25. Lexy J. Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda Karya, hal. 36. [↑](#footnote-ref-25)
26. Burhan Ashofa, 1998, *Metode Penelitan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 20-21. [↑](#footnote-ref-26)
27. Mardiasmo, 2017, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 27. [↑](#footnote-ref-27)
28. Handayani, 2016, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Pajak di Indonesia*, Jurnal Hukm dan Peradilan, Vol. 5, No. 1. [↑](#footnote-ref-28)
29. Sutrisno, 2014, *Penggelapan Pajak: Suatu Tindak Pidana yang Merugikan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 4, No. 1. [↑](#footnote-ref-29)
30. Wibisono, S., 2015, *Penggelapan Pajak dan Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak*, Jurnal Hukum dan Peradaban, Bol. 17, No. 2. [↑](#footnote-ref-30)
31. Roni Sihombing, 2018, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penggelapan Pajak Menurut Undang-Undang KUP*, Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol. 6. No. 2. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-32)
33. Indrianto Seno Adji, 2013, *Hukum Pidana Perpajakan: Pelanggaran Administrasi Pajak dan Tindak Pidana Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 31. [↑](#footnote-ref-33)
34. Febrianti Kusumaningrum, 2017, *Penggelapan Pajak: Analisis Hukum Pidana dan Aspek Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 67. [↑](#footnote-ref-34)
35. Sri Purwaningsih, 2015, *Tindak Pidana Penggelapan Pajak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Justicia, Vol. 13, No. 2 [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad Ibnu Fathoni, 2015, *Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 2 [↑](#footnote-ref-36)
37. Febrianti Kusumaningrum, *Op.Cit.*, hal. 82 [↑](#footnote-ref-37)
38. Nur Hidayah, 2016, *Tindak Pidana Penggelapan Pajak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perpajakan di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3, No. 3. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-39)
40. Timbo Mangaranap Sirait, 2019, *Hukum Pidana Pajak (Materiil dan Formil)*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 34. [↑](#footnote-ref-40)
41. R.A. Kusumawati, 2017, *Urgensi Kewenangan Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17, No. 1. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ahmad Djazuli, 2019, *Hukum Pidana Pajak dalam Perspektif Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 42. [↑](#footnote-ref-42)
43. Dewi Putri Utami, 2019, *Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8, No. 1. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ahmad Djazuli, *Op.Cit.*, hal. 84. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-45)
46. R.A. Kusumawati, *Op.Cit*. [↑](#footnote-ref-46)
47. Suryani Susanti, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Pajak oleh Pengadilan Pajak dalam Rangka Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 9, No. 1. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-48)
49. Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 223. [↑](#footnote-ref-49)
50. Bella Oktaviani, 2016, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collabarotor Tindak Pidana Penggelapan Pajak di Indonesia*, Recidive, Vol. 5 No. 1. [↑](#footnote-ref-50)
51. Mudzakkir, 2011, *Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, No. 1. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ni Made Ayu Rastiti, 2022, *Eksekusi Perkara Tindak Pidana Pajak Oleh Kejaksaan Tinggi Bali (Studi Putusan Pengadilan No: 123/Pid.Sus/2020/PN.DPS)*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 9. [↑](#footnote-ref-52)
53. Sutaryo dan Margono Slamet, 2018, *Pajak dan Sistem Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 140. [↑](#footnote-ref-53)
54. Rizki Amalia, 2019, *Tindakan Pencegahan Pelanggaran Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol. 4, No. 2. [↑](#footnote-ref-54)
55. Muhammad Ridwan, 2019, *Tindakan Pencegahan dalam Penegakan Hukum Pajak*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 1. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-56)
57. Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, *Pelaksanaan Kebijakan Penyanderaan Pajak (gijzeling) dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, SASI, Vol. 26, No. 1, 2020. [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-58)
59. Pasal 1 PERMA Nomor 1Tahun 2000 [↑](#footnote-ref-59)
60. Pasal 1 angka 18 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. [↑](#footnote-ref-60)
61. Pudyatmoko, Y Sri, 2007, *Penegakkan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta: Salemba, Hal. 112. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-62)
63. Khorul Hidayah dan Mudawamah, 2015, *Gizjeling dalam Hukum Pajak di Indonesia Kajiaan Perundang-undangan dan Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki Press, hal. 2. [↑](#footnote-ref-63)
64. Tjip Ismail, 2001, *Penyanderaan sebagai Upaya Law Enforcement*, Majalah Hukum Bisnis, 15 September, hal. 53 [↑](#footnote-ref-64)
65. Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 1997 [↑](#footnote-ref-65)
66. Muhammad Rusjdi, 2007, *PPSP: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: Indeks, hal. 107. [↑](#footnote-ref-66)
67. Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan*, Jakarta: Penaku, hal. 167. [↑](#footnote-ref-67)
68. Artha Poltak Naibaho, dkk, 2016, *Paksa Badan (Gijzeling) sebagai Instrumen Penagihan Pajak (Kajian Yuridis dari Perspektif Hukum Pidana)*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 3. [↑](#footnote-ref-68)
69. Muhammad Rusjdi, Op.Cit., hal. 9. [↑](#footnote-ref-69)
70. Rochmat Soemitro, *Asas-asas Hukum Perpajakan*, Bandung: Binacipta, 1991, hal. 7. [↑](#footnote-ref-70)
71. Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2018, hal. 3. [↑](#footnote-ref-71)
72. Anastasia Diana dan Lilis Setawati, *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: Andi, 2014, hal. 64-66. [↑](#footnote-ref-72)
73. Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, Bandung: Pionir Jaya, 2003, hal. 520. [↑](#footnote-ref-73)
74. J.C.T. Simorangkir et. al, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1980, hal. 169 [↑](#footnote-ref-74)
75. Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, hal 332-334. [↑](#footnote-ref-75)
76. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [↑](#footnote-ref-76)
77. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [↑](#footnote-ref-77)
78. https://accounting.binus.ac.id/2021/12/04/proses-penyidikan-pajak/, diakses pada tanggal 8 April 2023, Pukul 8:43 wib. [↑](#footnote-ref-78)
79. M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 109. [↑](#footnote-ref-79)
80. Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan [↑](#footnote-ref-80)
81. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-81)
82. Direktori Mahkamah Agung RI [↑](#footnote-ref-82)
83. www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 01 Maret 2023, Pukul 16:18 WIB. [↑](#footnote-ref-83)
84. Syaifuddin Amin, *Pelayanan Perpajakan yang Profesional dan Berkeadilan*, Jakarta: Kencana, 2019, hal. 127. [↑](#footnote-ref-84)
85. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-85)
86. Tri Sudaryanto, *Analisis Pelaksanaan Koordinasi Antara Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Pemeriksaan Pajak*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 21, No. 3, 2019, 185-196. [↑](#footnote-ref-86)
87. Abdul Rohman, *Analisis Implementasi Koordinasi Antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pemerintah Daerah dalam Pengumpulan Penerimaan Pajak Daerah*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 8, No. 1, 2020, hal. 40-52. [↑](#footnote-ref-87)
88. Syaifuddin Amin, *Op.Cit.*, hal. 38. [↑](#footnote-ref-88)
89. M.A. Hidayat, *Teori dan Praktik Penegakan Hukum Pajak*, Jakarta: Kencana, 2019, hal. 67. [↑](#footnote-ref-89)
90. Abdul Pujianto, *Pengawasan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam Penegakan Hukum Pajak*, Jakarta: Grasindo, 2017, hal. 85. [↑](#footnote-ref-90)
91. *Ibid.*, hal. 102. [↑](#footnote-ref-91)
92. Winarto Suroyo, *Reformasi Perpajakan: dari Ideologi ke Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hal. 55. [↑](#footnote-ref-92)
93. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-93)
94. M.A. Hidayat, *Op.Cit.*, hal. 132. [↑](#footnote-ref-94)
95. Ahmad Yusuf, *Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hal. 110. [↑](#footnote-ref-95)
96. *Ibid.*, hal. 103. [↑](#footnote-ref-96)
97. Anggita Astrianti, *Peran Direktorat Pajak dalam Pencegahan Praktik Penggelapan Pajak*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4, No. 2, 2019, hal. 141-152. [↑](#footnote-ref-97)
98. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-98)
99. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-99)